



NOTA KESEPAKATAN

antara

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

dengan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Nomor : 900/026/TAPD/2025; dan

Nomor : 180/18/DPRD/2025

Tanggal : 15 Agustus 2025

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

KUA 2026



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025**

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR: 900/026 / TAPD/2025
dan
NOMOR: 180/ 18 /DPRD/2025

Tanggal 15 Agustus 2025

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **H. AGUSTIAR SABRAN**
Jabatan : Gubernur Kalimantan Tengah
Alamat Kantor : Jl. RTA. Milono No. 1 Palangka Raya
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Nama : **H. EDY PRATOWO, S.Sos., M.M**
Jabatan : Wakil Gubernur Kalimantan Tengah
Alamat Kantor : Jl. RTA. Milono No. 1 Palangka Raya
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

3. a. Nama : **Drs. ARTON, S. DOHONG**
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat Kantor : Jl. S. Parman No. 2 Palangka Raya

- b. Nama : **RISKA AGUSTIN A.Ak., M.M**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat Kantor : Jl. S. Parman No. 2 Palangka Raya
- c. Nama : **MUHAMMAD ANSYARI**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat Kantor : Jl. S. Parman No. 2 Palangka Raya

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Palangka Raya, 15 Agustus 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

selaku,
PIHAK PERTAMA



H. AGUSTIAR SABRAN

**WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN TENGAH**

H. EDY PRATOWO, S.Sos., M.M

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

selaku,
PIHAK KEDUA



Drs. ARTON, S. DOHONG

Ketua

RISKA AGUSTIN A.Ak., M.M

Wakil Ketua

MUHAMMAD ANSYARI

Wakil Ketua

KA BIRO HUKUM	KA BAPENDA	KA BAPPEDALITBANG	KA BKAD	INSPEKTUR	ASISTEN	SEKDA



Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

LAMPIRAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA) TAHUN ANGGARAN 2026

P
E
M
E
R
I
N
T
A
H

P
R
O
V
I
N
S
I

K
A
L
I
M
A
N
T
A
N

T
E
N
G
A
H

K
U
A

T
A

2
0
2
6



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang I –1

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) I –4

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2026..... I -5

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Makro Daerah II –1

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi II –1

2.1.2 Laju Inflasi..... II – 3

2.1.3 Kemiskinan II – 5

2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka II – 6

2.1.5 Indeks Gini II –7

2.2 Arah Kebijakan Ekonomi Makro Daerah II– 8

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN III – 1

3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD III – 5

3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi III – 5

3.2.2 Laju Inflasi..... III – 7

3.2.3 Investasi..... III – 8

3.2.4 Lain-lain Asumsi III – 8

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah IV – 1

4.2 Target Pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan lai-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2026 IV – 5

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah..... IV – 5

4.2.2 Pendapatan Transfer IV –11

4.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah..... IV –11



BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Belanja Daerah..... V – 1

5.1.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2026..... V – 1

5.1.2 Rencana Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun 2026..... V – 5

5.1.3 Kebijakan Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa,

Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi

Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga V – 6

5.1.4 Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang

dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah .. V –11

5.1.5 Kebijakan Belanja berdasarkan Urusan Pemerintah

Daerah (Urusan Wajib dan Urusan Pilihan) dan

Perangkat Daerah V – 15

5.1.6 Kebijakan Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan

Minimal (SPM) V – 16

5.1.7 Kebijakan Belanja Untuk Pengentasan Kemiskinan Ekstrim

..... V – 37

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan..... VI – 1

6.1.1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) .. VI – 1

6.1.2 Pencairan Dana Cadangan VI – 1

6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan VI – 1

6.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah VI – 2

6.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah VI – 2

6.1.6 Penerimaan Piutang Daerah..... VI – 2

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan VI – 2

6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan VI – 2

6.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah VI – 2

6.2.3 Pembayaran Pokok Utang VI – 3

6.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah VI – 3



BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah VII.1

7.2 Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah VII.2

7.3 Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah VII.3

BAB VIII PENUTUP VIII.1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Target Capaian dan Realisasi Indikator Makro Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2024 serta Target 2025 dan 2026 ... II – 9

Tabel 2.2 Kerangka Struktur Pendanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 II –13

Tabel 3.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Indonesia Tahun 2026 III – 4

Tabel 3.2 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Provinsi Kalteng Tahun 2026 III – 5

Tabel 4.1 Rencana Target Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2026..... IV – 6

Tabel 4.2 Rencana Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 IV – 12

Tabel 5.1 Penyelerasan Program Prioritas Daerah Huma Betang dan Program Prioritas Nasional V – 13

Tabel 5.2 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) V – 16

Tabel 5.3 Belanja Pemenuhan Pengentasan Kemiskinan Ekstrim V – 38



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Sinkronisasi Penyusunan Rancangan APBD (UU 17/2003, UU 25/2004, UU 33/2004, UU 23/2014)..... I - 3

Gambar 2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalteng Tahun 2019-2025 ... II – 2

Gambar 2.2 Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (yoy) Tahun 2024 II – 3

Gambar 2.3 Tingkat Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024-2025..... II – 4

Gambar 2.4 Persentase Penduduk Miskin Maret 2017-September 2024 II – 6

Gambar 2.5 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Tengah II – 7

Gambar 2.6 Indeks Gini di Kalimantan Tengah, Maret 2018-2024..... II – 8

Gambar 2.8 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Daerah Tahun 2021 – 2023 II – 11

Gambar 2.9 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan Tahun 2021 – 2023 (%) II – 11

Gambar 2.10 Indeks Gini di Kalimantan Tengah, Maret 2016-2022..... II – 12

Gambar 3.1 Struktur Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan I Tahun 2023 III – 4



Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

P
E
M
E
R
I
N
T
A
H

P
R
O
V
I
N
S
I

K
A
L
I
M
A
N
T
A
N

T
E
N
G
A
H

K
U
A
T
A

2
0
2
2
6

BAB I
PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) menyatakan bahwa Kepala daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama, selanjutnya KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Dalam penentuan Kebijakan Umum APBD ini menggunakan pendekatan kinerja sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklarifikasikan anggaran berdasarkan kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Anggaran yang telah dikelompokkan dalam kegiatan akan memudahkan pihak yang berkepentingan untuk melakukan pengukuran kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan.

Berdasarkan peraturan pengelolaan keuangan daerah, penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
4. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.



P E M E R I N T A H P R O V I N S I
K U A T A 2 0 2 6

KALIMANTAN
TENGAH

Gambar 1.1





Proses Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 dilakukan dengan tahapan pembahasan antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS, dimana telah dilakukan pembahasan awal antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan hal tersebut, mengacu pada Peraturan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 disebutkan bahwa dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS, paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, maka Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berdasarkan RKPD, rancangan KUA dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 Ayat (2) berbunyi “Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD” dan Ayat (3) “Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan”. Dengan demikian pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat dalam Rancangan APBD TA 2026 ini berpedoman pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 dan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Maksud penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026 adalah untuk memberikan gambaran umum tentang rencana dan kondisi ekonomi makro, kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta strategi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun berkenaan.

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:



1. Untuk menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, serta strategi pencapaiannya untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.
3. Menyinkronkan agenda dan program prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 dengan kebutuhan riil masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga pendanaan desentralisasi sinergis dengan pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Merupakan media konsultasi publik bagi segenap *stakeholders* daerah untuk merumuskan kebijakan umum pembangunan daerah, serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan tahun anggaran berikutnya, khususnya yang akan dibiayai melalui APBD.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2026

Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026 disusun berdasarkan :

1. Undang–Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun



2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2026 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 15);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005–2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 85);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 102);
24. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Nomor 31).



Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

P
E
M
E
R
I
N
T
A
H

K
U
A
T
A

2
0
2
2
6

P
R
O
V
I
N
S
I

K
A
L
I
M
A
N
T
A
N

T
E
N
G
A
H

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH



BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Makro Daerah

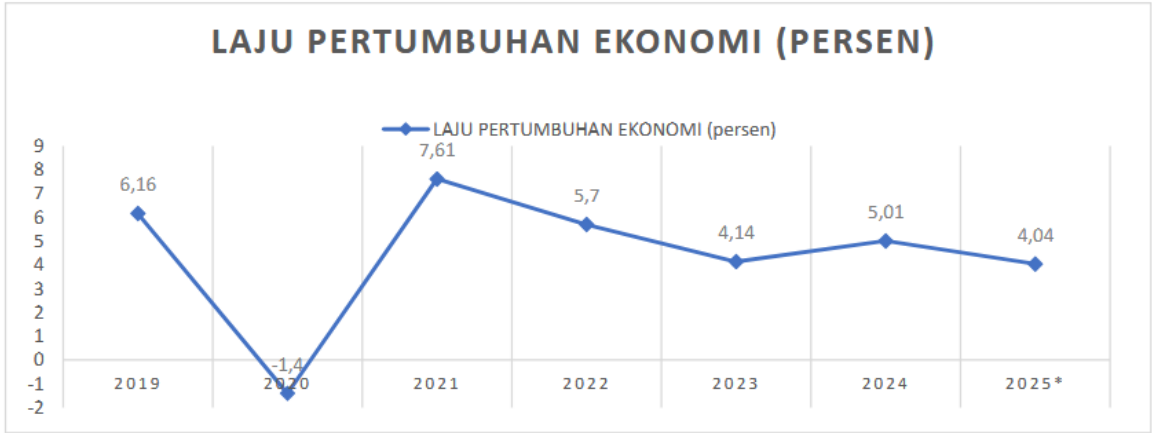
Asumsi dasar Kebijakan Umum APBD meliputi aspek perkembangan indikator ekonomi makro daerah dan keuangan daerah. Dari sisi perkembangan indikator ekonomi makro daerah, asumsi dasar Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 antara lain meliputi :

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan. Salah satu instrumen untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data PDRB, baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Perhitungan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pengeluaran dan pendapatan.

1) Kondisi Ekonomi

Ekonomi Kalimantan Tengah Triwulan I-2025 dibanding Triwulan I-2024 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 4,04 persen. Pertumbuhan terjadi hampir pada semua kategori lapangan usaha, kecuali pada dua kategori lapangan usaha yang mengalami kontraksi, yaitu kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar 2,44 persen, dan kategori Konstruksi sebesar 0,71 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial sebesar 17,98 persen yang diikuti kategori Jasa Perusahaan sebesar 17,43 persen dan Jasa Lainnya sebesar 14,92 persen. Sementara itu, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang memiliki peran dominan mengalami pertumbuhan sebesar 5,72 persen.



Ket * data triwulan I tahun 2025 (yoy)
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah 2025

Gambar 2.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2025

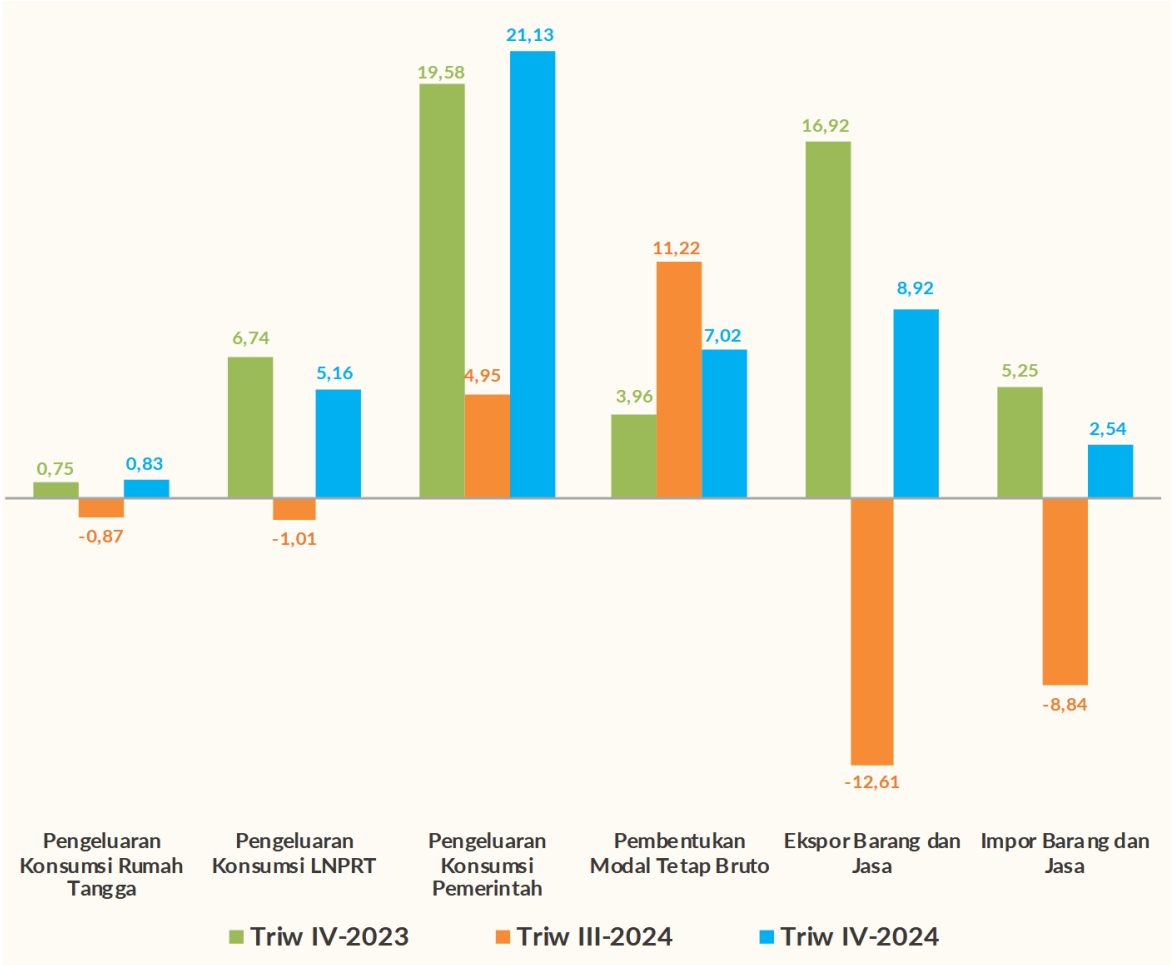
Struktur perekonomian Kalimantan Tengah Triwulan I Tahun 2025 didominasi oleh kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 23,73 persen, diikuti oleh Industri Pengolahan sebesar 16,88 persen, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda motor sebesar 12,51 persen, dan Pertambangan dan Penggalian sebesar 10,39 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kalimantan Tengah mencapai 63,52 persen. Penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah triwulan-I 2025 (y-on-y) berasal dari Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 1,18 persen; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial sebesar 0,84 persen; dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 0,70 persen.

2) Struktur Ekonomi

Ekonomi Kalimantan Tengah triwulan IV-2024 tumbuh 8,29 persen dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q). Pertumbuhan terjadi pada hampir semua komponen pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 21,13 persen; diikuti Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 8,92 persen; Komponen Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) sebesar 7,02 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PK-LNPRT) sebesar 5,16 persen; dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 0,83 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan sebesar 2,54 persen. Bila dilihat dari penciptaan sumber



pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah triwulan IV-2024 (q-to-q), Komponen Ekspor Barang dan Jasa memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 3,89 persen diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 3,00 persen dan Komponen PMTB sebesar 2,76 persen.



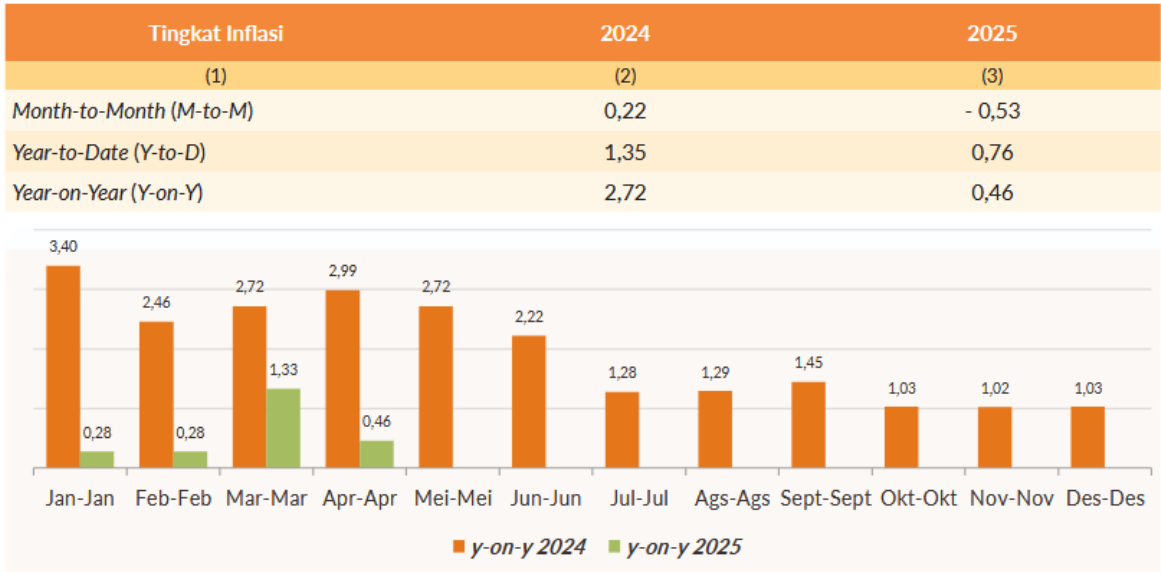
Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Tengah 2025

Gambar 2.2

Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (yoy) 2024

2.1.2. Laju Inflasi

Perkembangan Indeks Harga Konsumen masyarakat perkotaan di Kalimantan Tengah, pantauan melalui dua kota IHK (Sukamara dan Kapuas). Pada Mei 2025 terjadi inflasi year-on-year (y-on-y) Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 0,46 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,45. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Sukamara sebesar 1,14 persen dengan IHK sebesar 109,54. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 0,21 persen dengan IHK sebesar 108,00.



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah 2025

Gambar 2.3

Tingkat Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah 2024–2025

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,26 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,23 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,20 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,11 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,07 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,28 persen; dan kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,55 persen.

Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok transportasi sebesar 1,37 persen; kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,73 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,37 persen; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,15 persen. Tingkat deflasi month-to-month (m-to-m) Provinsi Kalimantan Tengah pada Mei 2025 sebesar 0,53 persen dan tingkat inflasi *year-to-date* (y-to-d) Mei 2025 sebesar 0,76 persen.

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Mei 2025 di Kalimantan Tengah secara umum menunjukkan adanya peningkatan dibanding bulan yang sama Tahun 2024. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Kalimantan Tengah di 4 kabupaten/kota, pada Mei 2025 terjadi inflasi y-on-y sebesar 0,46 persen, atau terjadi peningkatan Indeks



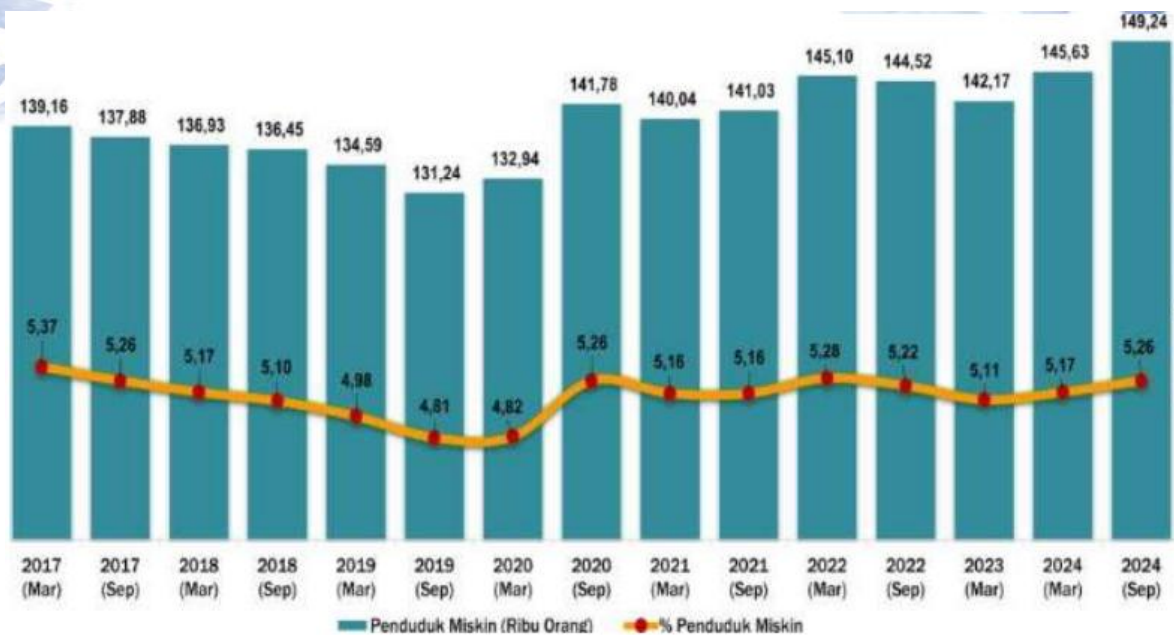
Harga Konsumen (IHK) dari 106,96 pada Mei 2024 menjadi 107,45 pada Mei 2025.

2.1.3. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan situasi dimana individu atau suatu rumah tangga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan menjadi permasalahan klasik dan bersifat multidimensional dan cenderung menyebabkan terhambatnya pembangunan di masa akan datang. Oleh karenanya, program/kegiatan pengentasan kemiskinan harus tepat sasaran. Untuk mengukur tingkat kemiskinan, diperlukan batas/garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Secara umum, pada periode Maret 2017–September 2024, tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, kecuali pada September 2020, September 2021, Maret 2022, Maret 2024 dan September 2024. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2022 terjadi setelah adanya kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2020 dan September 2020 terjadi ketika ada pembatasan mobilitas penduduk saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia.

Perkembangan tingkat kemiskinan Maret 2017 sampai dengan September 2024 disajikan pada Gambar 2.4 dibawah ini

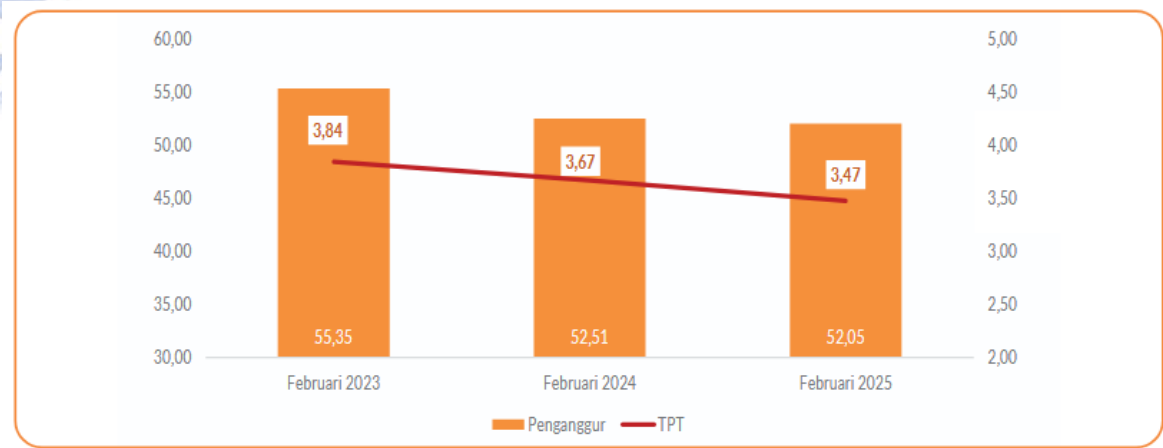


Ket * data triwulan I tahun 2024 (yoy)
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah 2025

Gambar 2.4
Presentase Penduduk Miskin, Maret 2017-September 2024

2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan usaha di pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT juga merefleksikan kemampuan pasar kerja yang belum bisa menciptakan pekerjaan bagi mereka yang ingin bekerja namun tidak mendapatkannya. TPT hasil Sakernas Februari 2025 adalah sebesar 3,47 persen. Hal ini berarti dari setiap 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar tiga sampai empat orang yang menganggur. Dalam tiga tahun terakhir, TPT Kalimantan Tengah terus mengalami penurunan seiring dengan penurunan jumlah penganggur. Dibandingkan kondisi Februari 2024, TPT Kalimantan Tengah mengalami penurunan sebesar 0,19 persen poin atau sebanyak 0,46 ribu orang.



Ket * data triwulan I tahun 2024 (yoy)
Sumber: : BPS Provinsi Kalimantan Tengah 2025

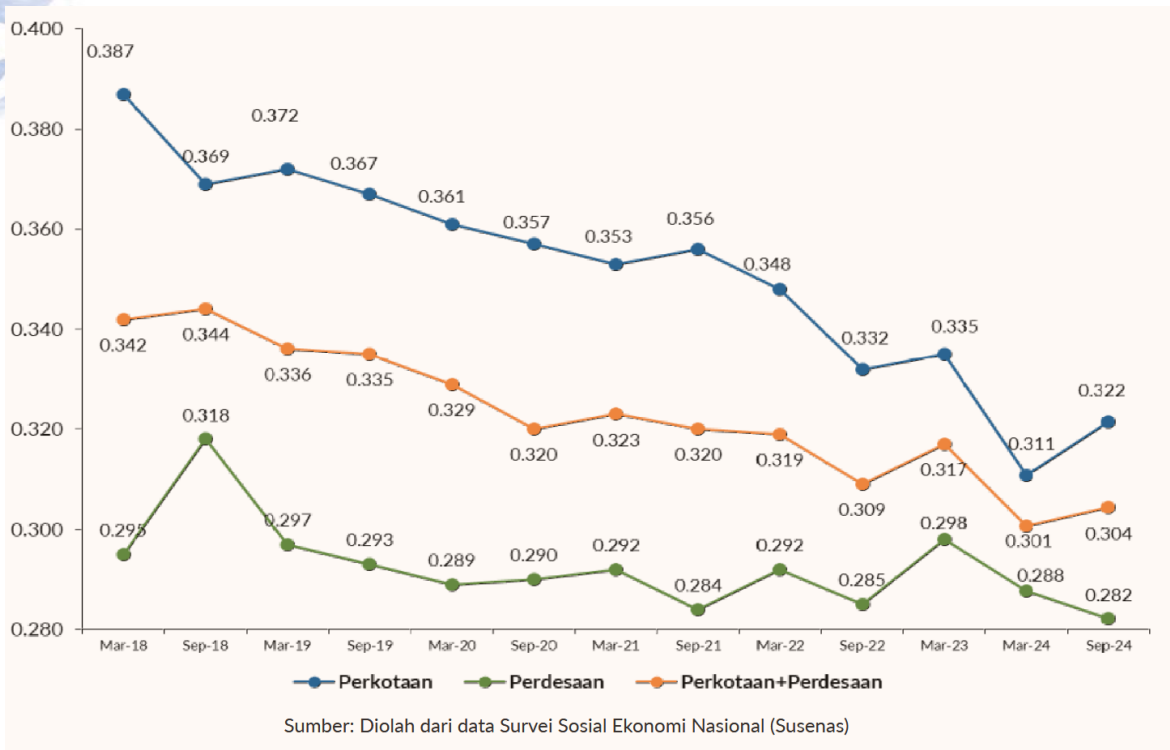
Gambar 2.5

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Tengah

Mengacu pada target Kalimantan Tengah dalam RPJMD Tahun 2021-2026, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kalimantan Tengah tahun 2025 dalam RKPD Tahun 2025 target sebesar 3,32-3,91 persen dengan capaian TW I adalah 3,47 persen. Diharapkan seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi, dapat meningkatkan kesempatan kerja baik melalui peluang usaha maupun menjadi pegawai pemerintah.

2.1.5. Indeks Gini

Gini Ratio atau indeks gini merupakan ukuran tingkat ketimpangan pengeluaran sebagai proksi pendapatan penduduk yang banyak digunakan di berbagai negara. Perubahan Gini Ratio merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. angka gini ratio mengalami fluktuasi dan pada Maret 2023 mencapai 0,317 yang merupakan angka tertinggi sejak September 2020. Setelah itu, gini ratio menurun 0.016 poin pada Maret 2024 dan kembali meningkat pada September 2024 menjadi 0,304 (Gambar 1). Artinya, pemerataan pengeluaran penduduk Kalimantan Tengah pada September 2024 semakin membaik. Jika dilihat berdasarkan daerah, gini ratio di daerah perkotaan pada September 2024 adalah sebesar 0,322. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan sebesar 0,011 poin dibanding Maret 2024 yang sebesar 0,311. Sementara itu, gini ratio di daerah perdesaan pada September 2024 tercatat sebesar 0,282, menurun 0,006 poin dibandingkan kondisi Maret 2024. Berikut adalah indeks gini, Maret 2018-2024 :



Sumber : Berita Resmi Statistik, 2025

Gambar 2.6

Indeks Gini di Kalimantan Tengah, Maret 2018-2024

Berdasarkan chart di atas, diketahui dalam 5 (lima) tahun terakhir ketimpangan pada daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan, meskipun demikian ketimpangan tersebut mengalami penurunan di tiap tahunnya yang tentunya berdampak positif dalam kehidupan masyarakat, artinya ketimpangan pendapatan dalam masyarakat dapat ditekan. Indeks gini Provinsi Kalimantan Tengah masih cenderung kategori rendah. Perlu kebijakan pemerintah melalui program yang tepat sasaran serta andil dari pemangku kepentingan lainnya untuk dapat terus menekan tingkat ketimpangan pendapatan agar kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

2.2. Arah Kebijakan Ekonomi Makro Daerah

Proyeksi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi dasar dalam penyelenggaraan otonomi daerah pada kabupaten/kota saat ini. Implikasi dari pemberlakuan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah adanya pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang disertai pemberian sumber-sumber keuangan untuk mendanai urusan yang diserahkan kepada



daerah dengan tujuan semakin meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatkan aktifitas perekonomian daerah, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Tabel 2.1
Target Capaian dan Realisasi Indikator Makro Pembangunan
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2024 serta Target 2025 dan 2026

No	Indikator Makro	Target dan Realisasi Capaian Kinerja							
		2022		2023		2024		Target	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2025	2026
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1,40	5,5-6,5	4,14	5,70	5,80	4,46	5,60	5.46-6,0
2	Tingkat Kemiskinan (%)	5,26	4,44	5,11	4,81	4,66	5,26	4,11-4,61	4,31-4,89
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,58	4	4,10	4,00	3,90	4,01	3,32-3,91	3,30-3,73
4	Intensitas Emisi GRK (%)	-	-	-	-	-	-	76	74,69

Sumber : RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Tengah dalam Angka 2025, Berita Resmi Pusat Statistik 2024

Arah kebijakan keuangan daerah ditujukan agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien, sehingga diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

Selain hal tersebut di atas, APBD yang direncanakan juga perlu mempedomani norma dan prinsip penganggaran seperti :

1. **Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah**, hal ini merupakan persyaratan utama guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan tanggungjawab. Transparansi dan akuntabilitas anggaran juga menjadi instrument evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat, maka APBD dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan.



2. Disiplin Anggaran, program harus disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan
3. Keadilan Anggaran Pendapatan, pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu Pemerintah mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.
4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran, dana yang tersedia dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu untuk mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaannya ditetapkan secara jelas arah dan tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan.

2.2.1 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2026, pemerintah daerah mengacu pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Peraturan ini menggantikan PP No.58 Tahun 2005 dan memberikan kerangka kerja yang lebih mutakhir dalam pengelolaan keuangan, sehingga semua perencanaan dan pelaksanaan kebijakan keuangan daerah harus sejalan dengan ketentuan yang telah diperbaharui. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dalam satu periode anggaran (2026), klasifikasi belanja daerah dikelompokkan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Merupakan pengeluaran rutin yang berkaitan dengan kegiatan harian pemerintah daerah. Dana yang dialokasikan untuk belanja operasi diarahkan untuk mendukung kegiatan dan layanan publik dengan manfaat jangka pendek, sehingga memungkinkan peningkatan efisiensi layanan dalam waktu singkat.



2. Belanja Modal

Meliputi investasi dalam perolehan aset tetap maupun aset lain yang memiliki manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pada tahun 2026, pengeluaran modal difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas aset strategis daerah guna mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

3. Belanja Tidak Terduga

Dikhususkan untuk penanggulangan situasi darurat atau kebutuhan mendesak yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Dalam perencanaan tahun 2026, alokasi untuk belanja tidak terduga disiapkan sebagai langkah antisipatif agar pemerintah daerah dapat dengan cepat merespons berbagai peristiwa atau krisis yang mungkin terjadi, menjaga stabilitas pelayanan publik dan keuangan daerah.

4. Belanja Transfer

Melibatkan pengeluaran dana yang dialihkan dari pemerintah daerah kepada entitas pemerintah daerah lainnya atau kepada pemerintah desa. Kebijakan transfer ini mendukung koordinasi dan pemerataan pembangunan antar wilayah, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa dalam rangka mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan selama tahun 2026.

2.2.2 Arah kebijakan pembiayaan daerah

Pembiayaan Daerah merupakan rangkaian transaksi keuangan yang dirancang untuk menutupi defisit anggaran atau mengoptimalkan pemanfaatan surplus. Terjadinya defisit atau surplus ini ditandai dengan adanya perbedaan antara anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dana pembiayaan dianggarkan untuk setiap pengeluaran yang nantinya akan dikembalikan dan/atau untuk penerimaan yang harus dibayarkan kembali, baik di tahun anggaran berjalan maupun di tahun berikutnya. Dalam penyusunannya, pembiayaan daerah dibagi ke dalam dua bagian, yaitu Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

1. Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan muncul ketika jumlah pengeluaran melebihi penerimaan sehingga terjadi defisit. Sumber-sumber penerimaan ini meliputi sisa lebih perhitungan anggaran



(SiLPA), transfer dari dana Cadangan (DCD), hasil penjualan kekayaan daerah yang telah dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, pengembalian pemberian pinjaman, serta penerimaan piutang daerah.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan diterapkan ketika terjadi surplus atau kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan ini dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan, investasi melalui penyertaan modal serta pembelian surat berharga atau saham, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan pencatatan sisa lebih perhitungan. Dengan demikian, anggaran pembiayaan diarahkan untuk menutup defisit anggaran apabila terjadi kekurangan, dan untuk mendanai investasi, pembentukan dana cadangan, serta kewajiban lain saat terjadi surplus.

2.2.3 Arah kebijakan pendapatan dan belanja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026

Dalam menyusun dan melaksanakan belanja daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menerapkan kerangka pengendalian anggaran yang ketat untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Meskipun demikian prinsip penghematan dan efisiensi tidak mengesampingkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sebagai prioritas utama; seluruh kegiatan belanja harus selaras dengan upaya menjaga kualitas layanan publik, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur dasar. Di samping itu, alokasi belanja minimum—yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan—harus dipenuhi secara penuh agar komitmen anggaran untuk sektor-sektor strategis tidak terabaikan. Dengan demikian, setiap proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan belanja daerah senantiasa mempertimbangkan kombinasi efisiensi biaya dan efektivitas output, sehingga anggaran yang terbatas dapat memberikan hasil manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat lokal.



Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Tabel 2.2
Kerangka Struktur Pendanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2026

No.	URAIAN	APBD 2025	KUA PPAS 2026	Selisih	Selisih (%)
1	2	3	4	5=4-3	6=5/4*100
1.	PENDAPATAN DAERAH	9.320.158.094.735,00	7.105.259.324.284,00	-2.214.898.770.451,00	-23,76%
1.1.	PENDAPATAN DAERAH ASLI	4.681.931.097.735,00	2.775.707.812.284,00	-1.906.223.285.451,00	-40,71%
1.1.1.	Pajak Daerah	4.047.858.500.934,00	2.340.111.659.871,00	-1.707.746.841.063,00	-42,19%
1.1.2.	Retribusi Daerah	9.516.712.000,00	8.982.364.000,00	-534.348.000,00	-5,61%
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	60.602.368.190,00	41.994.660.233,00	-18.607.707.957,00	-30,70%
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	563.953.516.611,00	384.619.128.180,00	-179.334.388.431,00	-31,80%
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	4.298.232.194.000,00	4.328.262.808.000,00	30.030.614.000,00	0,70%
1.2.1.	Transfer Pemerintah Pusat	4.298.232.194.000,00	4.328.262.808.000,00	30.030.614.000,00	0,70%
1.2.2.	Transfer Antar Daerah	0	0	0,00	0,00%
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	339.994.803.000,00	1.288.704.000,00	-338.706.099.000,00	-99,62%
1.3.1.	Pendapatan Hibah	1.273.716.000,00	1.288.704.000,00	14.988.000,00	1,18%
1.3.3.	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	338.721.087.000,00	0	-338.721.087.000,00	-100,00%
2.	BELANJA DAERAH	10.220.158.094.735,00	7.371.706.548.944,00	-2.848.451.545.791,00	-27,87%
2.1	BELANJA OPERASI	5.433.678.700.466,00	3.971.504.178.331,85	-1.462.174.522.134,15	-26,91%
2.1.1	Belanja Pegawai	1.918.020.556.672,00	1.950.502.378.171,01	32.481.821.499,01	1,69%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.390.599.242.196,00	1.665.245.258.113,84	-725.353.984.082,16	-30,34%
2.1.3	Belanja Bunga	2.000.000.000,00	0	-2.000.000.000,00	-100,00%
2.1.4	Belanja Subsidi	76.181.503.510,00	60.650.000.000,00	-15.531.503.510,00	-20,39%
2.1.5	Belanja Hibah	982.662.493.805,00	156.084.864.769,00	-826.577.629.036,00	-84,12%
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	64.214.904.283,00	139.021.677.278,00	74.806.772.995,00	116,49%
2.2	BELANJA MODAL	3.131.639.721.405,00	679.999.584.468,75	-2.451.640.136.936,25	-78,29%
2.2.1	Belanja Modal	3.131.639.721.405,00	679.999.584.468,75	-2.451.640.136.936,25	-78,29%
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	131.600.034.400,00	60.000.000.000,00	-71.600.034.400,00	-54,41%
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	131.600.034.400,00	60.000.000.000,00	-71.600.034.400,00	-54,41%
2.4	BELANJA TRANSFER	1.523.239.638.464,00	2.660.202.786.143,40	1.136.963.147.679,40	74,64%
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	1.494.709.638.464,00	2.586.409.386.143,40	1.091.699.747.679,40	73,04%
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	28.530.000.000,00	73.793.400.000,00	45.263.400.000,00	158,65%

P
E
M
E
R
I
N
T
A
H

2
0
2
6

P
R
O
V
I
N
S
I

K
A
L
I
M
A
N
T
A
N
T
E
N
G
A
H



Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

No.	URAIAN	APBD 2025	KUA PPAS 2026	Selisih	Selisih (%)
	JUMLAH TOTAL BELANJA DAERAH	10.220.158.094.735,00	7.371.706.548.944,00	-2.848.451.545.791,00	-27,87%
	SURPLUS / (DEFISIT)	(900.000.000.000,00)	(266.447.224.660,00)	633.552.775.340,00	-70,39%
3.	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	900.000.000.000,00	266.447.224.660,00	-633.552.775.340,00	-70,39%
3.1.1.	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	900.000.000.000,00	266.447.224.660,00	-633.552.775.340,00	-70,39%
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0,00%
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0	0	0,00%
3.2.1.	Pembentukan dana cadangan	0	0	0	0,00%
3.2.2.	Penyertaan Modal (Insvestasi) Pemerintah Daerah	0	0	0	0,00%
	PEMBIAYAAN NETTO	900.000.000.000,00	266.447.224.660,00	-633.552.775.340,00	-70,39%
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (SiLPA)	0	0	0	0,00%

Sumber : Dokumen APBD dan SIPD (2025)

P
E
M
E
R
I
N
T
A
H

2
0
2
6

P
R
O
V
I
N
S
I

K
A
L
I
M
A
N
T
A
N

T
E
N
G
A
H



Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

P
E
M
E
R
I
N
T
A
H

P
R
O
V
I
N
S
I

K
A
L
I
M
A
N
T
A
N

T
E
N
G
A
H

K
U
A
T
A

2
0
2
2
6

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA



BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam APBN menjadi acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, hal ini karena adanya keterkaitan erat antara kebijakan fiskal di tingkat nasional dan daerah. Dalam APBN, pemerintah pusat telah menentukan target-target pembangunan tertentu yang perlu dicapai, baik dalam bentuk proyek prioritas maupun program nasional yang juga harus diimplementasikan di daerah. Dengan mengikuti asumsi APBN, pemerintah daerah dapat menyelaraskan APBD mereka agar selaras dengan target-target pembangunan nasional. Arah Kebijakan Nasional 2026 dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan ini menekankan pentingnya stabilitas makroekonomi, peningkatan daya saing industri, pemerataan pembangunan, serta penguatan sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan ekonomi hijau. Pemerintah juga menargetkan reformasi politik dan hukum, termasuk peningkatan transparansi dan tata kelola, reformasi birokrasi, serta pemberantasan korupsi. Di sisi lain, penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan ketahanan sosial menjadi pilar utama dalam mendukung daya saing nasional. Dalam sektor ekonomi, hilirisasi industri dan peningkatan nilai tambah dalam negeri menjadi strategi kunci untuk memperkuat struktur ekonomi nasional. Fokus kebijakan makro tahun 2026 adalah:

1. **Pertumbuhan Ekonomi dan Stabilitas Makro**
Pemerintah mengarahkan pertumbuhan ekonomi dengan menjaga keseimbangan antara konsumsi domestik, investasi, dan ekspor. Stabilitas inflasi dijaga untuk memastikan daya beli masyarakat tetap kuat. Kebijakan ini bertujuan menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi dunia usaha dan masyarakat, menghindari risiko makro ekonomi yang dapat menghambat pertumbuhan.



2. Kebijakan Fiskal dan Optimalisasi Pendapatan Negara

Formulasi kebijakan fiskal dilakukan dengan memperkuat system perpajakan, memperluas basis pajak, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penerimaan negara. Pemerintah juga berupaya menekan ketergantungan terhadap utang melalui optimalisasi belanja negara yang lebih produktif dan tepat sasaran. Selain itu, belanja negara difokuskan untuk mendukung program prioritas seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan guna mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

3. Penguatan Investasi dan Sektor Industri

Upaya peningkatan investasi dilakukan dengan menciptakan regulasi yang lebih fleksibel, memberikan insentif bagi investor strategis, serta meningkatkan kemudahan berusaha di berbagai sektor. Hilirisasi industri menjadi prioritas utama guna meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Sektor industri berbasis sumber daya alam, seperti energi, pertambangan, dan manufaktur, didorong untuk meningkatkan daya saing global melalui penerapan teknologi dan inovasi.

4. Peningkatan Ekspor dan Stabilitas Eksternal

Diversifikasi ekspor menjadi kunci untuk memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar global dengan fokus pada industry manufaktur, produk agroindustri, dan teknologi berbasis inovasi. Selain itu, kebijakan perdagangan internasional yang lebih adaptif diterapkan guna menghadapi ketidakpastian global dan meningkatkan surplus neraca perdagangan yang berkelanjutan.

5. Pembangunan Infrastruktur dan Transformasi Ekonomi Hijau

Pemerintah melanjutkan pembangunan infrastruktur strategis, termasuk transportasi, energi, dan telekomunikasi, untuk meningkatkan konektivitas serta mempercepat distribusi barang dan jasa. Sejalan dengan komitmen terhadap Pembangunan berkelanjutan, investasi dalam energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan hidro semakin diprioritaskan guna mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Program ekonomi rendah karbon juga diperkuat melalui penerapan



industri hijau dan insentif bagi perusahaan yang menerapkan praktik bisnis ramah lingkungan.

6. Penguatan SDM dan Perlindungan Sosial

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri, serta peningkatan akses pendidikan tinggi. Pemerintah juga memperluas cakupan jaminan sosial dengan memastikan layanan kesehatan yang lebih merata, terutama bagi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah. Program perlindungan sosial, seperti bantuan sosial dan subsidi yang lebih tepat sasaran, ditingkatkan untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

7. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Efisiensi birokrasi menjadi fokus utama melalui digitalisasi layanan publik, penyederhanaan regulasi, serta penerapan system administrasi berbasis teknologi untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan. Pemerintah juga memperkuat pemberantasan korupsi melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta penguatan sistem pengawasan. Selain itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diperkuat untuk memastikan kebijakan pembangunan dapat diterapkan secara optimal di seluruh wilayah Indonesia.

Perekonomian nasional diperkirakan tumbuh kuat pada tahun 2025. Laju perekonomian diharapkan tumbuh 5,2 - 5,8 persen, yang utamanya ditopang oleh konvergensi aktivitas perekonomian regional serta kebijakan fiskal yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional. Perbaikan daya beli masyarakat dengan tingkat inflasi yang terjaga, diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga. Sementara itu, konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program yang lebih produktif, tidak hanya menopang perekonomian secara keseluruhan, tetapi juga memastikan keadilan dan ketepatan sasaran dalam belanja sosial. Investasi diperkirakan akan semakin meningkat, didorong oleh langkah-langkah penguatan eformasi struktural yang bertujuan meningkatkan kemudahan berusaha dan daya



saing. Kelanjutan PSN juga diharapkan akan berkontribusi pada pertumbuhan investasi yang berkelanjutan. Di tengah prospek ekonomi dunia yang terus membaik, kinerja ekspor diharapkan mengalami peningkatan. Selain itu, pengembangan produk-produk hilirisasi lanjutan diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional. Pada laju inflasi pada tahun 2026 diperkirakan dapat bergerak dalam rentang sasaran inflasi Pencapaian inflasi tahun 2026 pada rentang 1,5 – 3,5 persen perlu didukung dengan daya beli masyarakat yang kuat dan ekspektasi inflasi yang terjangkau Inflasi *volatile food* juga diarahkan agar berada di bawah lima persen, didukung dengan upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Pemerintah juga terus melakukan mitigasi risiko pada saat kondisi yang dapat memicu gejolak harga, terutama masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Berbagai kebijakan pengendalian inflasi terus dilaksanakan melalui koridor pengendalian inflasi nasional oleh TPIP dan TPID. Adapun asumsi dasar ekonomi makro untuk APBN Tahun 2026, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Indonesia Tahun 2026

Indikator	2025	2026
	APBN	KEM-PPKF
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2	5,2-5,8
Inflasi (%)	2,5	1,5-3,5
Nilai Tukar (Rp/USD)	16.000	16.500-16.900
Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	7,0	6,6-7,2
Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (USD/barel)	82	60-80
Lifting Minyak Mentah (rbph)	605	600-605
Lifting Gas Bumi (rbsmph)	1.005	953-1017

Sumber : Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2026

3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam dalam penyusunan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 disusun berdasarkan perkembangan dan dinamika makro ekonomi terkini, baik di tingkat global, nasional, maupun regional. Dalam rangka menjamin konsistensi arah ebijakan fiskal daerah, Pemerintah Provinsi



Kalimantan Tengah menetapkan sejumlah asumsi dasar yang menjadi pijakan utama dalam penyusunan perubahan APBD. Asumsi dasar tersebut mencakup indikator-indikator ekonomi makro daerah yang diperbarui berdasarkan realisasi semester pertama tahun berjalan, prediksi tren ekonomi nasional, serta potensi ekonomi daerah yang terukur. Adapun asumsi dasar ekonomi makro untuk APBD Tahun 2026 dapat dirangkum pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026

No	Indikator	Target dan Realisasi Capaian Kinerja					
		2023		2024		2025	2026
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
1	Pertumbuhan Makro	4,14	5,70	5,80	4,46	5,60	5,46-6,0
2	Tingkat Kemiskinan	5,11	4,81	4,66	5,26	4,11-4,61	4,31-4,89
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,10	4	3,90	4,01	3,32-3,91	3,30-3,73
4	Intensitas Emisi GRK	-	-	-	-	76	74,69

Sumber : RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, Berita Resmi Pusat Statistik 2024

3.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi ekonomi daerah tahun 2026 diharapkan berangsur membaik. Dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2026 pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah Tahun 2026 diproyeksikan sebesar 5,60 persen, sama dengan proyeksi tahun 2025 pada RKPD Perubahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025. Dengan asumsi Perekonomian Kalimantan Tengah :

1. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menjadi penopang utama PDRB, dengan kontribusi signifikan terhadap lapangan kerja dan ketahanan pangan. Asumsi pertumbuhan sektor ini pada 2025



diperkirakan akan stabil hingga meningkat moderat, didorong oleh beberapa hal antara lain:

- a. Program *food estate*;
- b. Modernisasi alat dan sistem pertanian;
- c. Perluasan lahan produktif;
- d. Pengembangan komoditas unggulan seperti kelapa sawit, padi, jagung, dan ikan air tawar

2. Sektor Pertambangan dan Penggalian diperkirakan berkontraksi melambat tergantung pada fluktuasi harga komoditas global, namun sektor ini masih menjadi kontributor dominan terhadap ekspor dan PDRB. Asumsinya tumbuh relatif moderat pada 2026 dengan penekanan pada :

- a. Stabilitas harga batubara dan bauksit
- b. Peningkatan produksi tambang legal
- c. Dukungan hilirisasi minerba untuk menciptakan nilai tambah di daerah

3. Sektor Industri pengolahan diperkirakan tumbuh meningkat sebagai hasil dari :

- a. Dorongan hilirisasi CPO dan karet
- b. Perluasan kawasan industri dan fasilitas logistic
- c. Kemudahan perizinan dan insentif investasi daerah.

4. Sektor konstruksi diperkirakan tumbuh meningkat Didorong oleh percepatan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, energi, dan fasilitas publik, sektor konstruksi diproyeksikan tumbuh solid. Kontribusinya tidak hanya pada PDRB, tetapi juga menciptakan *multiplier effect* terhadap sektor jasa lainnya. Hal ini sejalan dengan berlanjutnya proyek tahun jamak antara lain seperti proyek bundaran besar, *waterfront city*, RSUD kelas B, serta perbaikan jalan nasional maupun daerah diperkirakan menjadi pendorong pertumbuhan konstruksi pada akhir tahun 2024

5. Sektor perdagangan mencerminkan konsumsi masyarakat dan aktivitas ekonomi harian diperkirakan tumbuh meningkat. Asumsinya meningkat



seiring dengan Pemulihan daya beli pasca pandemi, Pertumbuhan digitalisasi UMKM, dan Integrasi rantai pasok antarwilayah.

3.2.2. Laju Inflasi

Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026 diperkirakan akan meningkat secara moderat. Dari sisi permintaan, tekanan inflasi akan tetap tenang seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat yang akan mendorong konsumsi masyarakat. Dari sisi penawaran, ketergantungan sebagian pasokan pangan Provinsi Kalimantan Tengah dari daerah lain masih akan menjadi resiko pendorong peningkatan inflasi Provinsi Kalimantan Tengah ke depan. Selain itu, terdapat potensi kenaikan harga energi seiring pemulihan domestik yang diperkirakan akan berimplikasi pada peningkatan inflasi pada peningkatan biaya produksi dan depresiasi nilai tukar yang dapat mendorong kenaikan harga pada komoditas yang menjadi bagian dari *imported inflation*.

Provinsi Kalimantan Tengah akan terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Daerah dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) guna menjaga inflasi sesuai kisaran targetnya. Koordinasi kebijakan antar instansi tersebut terutama ditujukan untuk mengantisipasi resiko inflasi komoditas pangan strategis, baik pada kelompok *Volatile food* (VF) maupun kelompok inti, dari kemungkinan adanya gangguan produksi dan distribusi. Selain itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2025 telah melakukan pengendalian inflasi dengan memberikan subsidi kepada masyarakat dalam meningkatkan daya beli masyarakat antara lain :

1. Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2. Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan;
3. Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha;



4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan;
5. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi;
6. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi lain;
7. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan.

3.2.3. Investasi

Investasi berperan penting terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah, peran investasi sebagai faktor pengungkit dalam mendorong perekonomian karena di samping akan mendorong kenaikan produksi secara signifikan dari modal yang ditanamkan, juga secara otomatis akan meningkatkan permintaan tenaga kerja sebagai input produksi. Oleh karena itu, adanya aktivitas produksi tersebut tentunya akan menghasilkan produktivitas yang selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah, dalam upaya menumbuhkan perekonomian Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah senantiasa terus berupaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif agar dapat meningkatkan nilai investasi.

Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2024 Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri dengan Nilai Investasi Rp1,50 (dalam triliun) Sedangkan untuk realisasi Investasi PMDN Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan Nilai Investasi sebesar Rp3,48 (dalam Triliun). Adapun sektor penyumbang mayoritas antara lain pertambangan, tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan Industri makanan.

3.2.4. Lain-lain Asumsi

Pada dasarnya, dalam Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) Tahun Anggaran 2026 ini mengacu pada dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026, dimana terdapat pengurangan pendapatan yang bersumber dari pengurangan Dana Transfer dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penurunan pendapatan tersebut mengakibatkan adanya efisiensi dan *refocusing* anggaran pada APBD Tahun



Anggaran 2026. Belanja daerah selain mengakomodir utang yang bersumber dana dari SiLPA yang tertuang pada Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, mengakomodir prioritas-prioritas yang harus dilaksanakan di tahun 2025 untuk memperluas layanan publik, meningkatkan kualitas pelayanan, program prioritas Presiden yakni ASTA CITA dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur yakni HUMA BETANG dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Asumsi dasar dalam APBD Tahun Anggaran 2026 disusun secara adaptif terhadap realitas ekonomi dan keuangan terkini. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk menjaga stabilitas fiskal daerah melalui penyesuaian asumsi yang rasional, terukur, dan responsif terhadap dinamika pembangunan, sehingga kebijakan anggaran tetap efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan capaian pembangunan yang berkelanjutan. Terkait lain-lain asumsi dalam penyusunan rancangan APBD Tahun 2026 diperlukan kebijakan yang tepat dengan skala prioritas dalam menentukan dan mengantisipasi risiko antara lain:

1. Melanjutkan dan mempercepat proses pengadaan proyek-proyek strategis yang sempat tertunda realisasinya terutama untuk proyek infrastruktur atau proyek-proyek yang memiliki urgensi tinggi untuk menjadi *enabler* perekonomian seperti perbaikan dan peningkatan jalan dan jembatan serta pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan pengairan lainnya
2. Bersinergi mengawal keberlangsungan dan percepatan realisasi Proyek Strategis Nasional (PSN) *Food Estate* di Kalimantan Tengah yang dapat membawa dampak positif bagi berbagai aspek diantaranya sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi maupun sebagai sumber ketahanan pangan di Kalimantan Tengah dan nasional
3. Mendorong kerjasama dengan startup berbasis agritechnology yang menyediakan platform, layanan yang berbasis digital, dan fokus pada peningkatan produktivitas perikanan. Dengan mendorong pengenalan penggunaan
4. Mendorong pemanfaatan teknologi dalam perdagangan masyarakat melalui inovasi pembuatan atau pemanfaatan platform digital untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan membantu pelaku usaha,



terutama UMKM dalam mendapatkan akses pasar yang lebih luas. Hal ini juga dapat dilakukan dengan bersinergi dengan pihak swasta terutama *start-up* lokal seperti transportasi online local dalam pelaksanaannya. Hal ini akan mendorong terciptanya rantai pasar yang semakin efisien sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat

5. Pemberdayaan UMKM melalui penciptaan permintaan oleh Pemerintah Daerah melalui himbauan Kepala Daerah kepada Aparatur Sipil Negara, instansi dan perbankan di daerah untuk menggunakan produk-produk lokal/UMKM baik kerajinan (kain, batik atau tenun, tas rotan) dan makanan yang ditetapkan melalui surat keputusan.



Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

P
E
M
E
R
I
N
T
A
H

P
R
O
V
I
N
S
I

K
A
L
I
M
A
N
T
A
N

T
E
N
G
A
H

K
U
A
T
A

2
0
2
2
6

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH



Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

P
E
M
E
R
I
N
T
A
H

P
R
O
V
I
N
S
I

K
A
L
I
M
A
N
T
A
N

T
E
N
G
A
H

K
U
A
T
A

2
0
2
2
6

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah merupakan unsur terpenting dalam rangka urusan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Tengah selalu diarahkan pada peningkatan kemampuan Keuangan Daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan daerah dengan menghilangkan berbagai kendala yang menghambat dan mengurangi biaya tinggi.

Pada sisi lain, kenaikan belanja cenderung lebih besar dari pada pertumbuhan pendapatan, sehingga harus ditempuh sejumlah langkah-langkah strategis dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah sehingga dapat membiayai pelaksanaan program/kegiatan pemerintahan daerah secara optimal.

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Berdasarkan pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur Pendapatan Daerah dikelompokkan atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Pendapatan Transfer
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diawali dengan penyusunan perencanaan yang memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana dalam perumusannya dilaksanakan secara transparan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara; Efisien, yaitu pencapaian keluaran (*output*) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (*output*) maksimal; Efektif, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal serta akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat disamping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi.

Berdasarkan kondisi makro ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2026 pada bab sebelumnya, maka kebijakan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 diarahkan pada:

1. Mengoptimalkan PAD sebagai indikator kemandirian fiskal dengan meningkatkan basis penerimaan dari pajak dan retribusi lokal. Proyeksi angka untuk 2026 menunjukkan peningkatan pada komponen PAD, sehingga perlu dirancang strategi penggalan potensi pajak dan retribusi dengan lebih intensif;
2. Mendorong BUMD agar lebih profesional dalam pengelolaan dan menghasilkan laba yang optimal. Hal ini tidak hanya meningkatkan komponen “Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan” tetapi juga mengurangi ketergantungan pada dana transfer dan penyederhanaan prosedur pajak dan non pajak;
3. Meningkatkan akurasi dan fleksibilitas dalam penyusunan APBD sehingga target pendapatan bisa disesuaikan secara dinamis dengan realisasi di lapangan.;
4. Mendorong pemanfaatan potensi sektor unggulan daerah, seperti pertambangan, kehutanan, perkebunan, dan pariwisata. Selain itu,



pengembangan aset daerah sebagai sumber pendapatan melalui pemanfaatan yang produktif dan bernilai tambah;

5. Mengoptimalkan koordinasi antara instansi terkait (misalnya Dinas Pendapatan, BUMD, BLUD, dan instansi keuangan lainnya) untuk memastikan tiap lini kebijakan keuangan saling mendukung dan terintegrasi dengan baik;
6. Meningkatkan peran strategi optimalisasi dana transfer (DBH, DAU, DAK) dengan penyesuaian formula, sehingga selaras dengan kinerja PAD dan bisa mengurangi ketergantungan pada sumber transfer yang berfluktuasi;
7. Melakukan kampanye dan edukasi mengenai pentingnya pajak dan retribusi serta manfaat transparansi pendapatan daerah agar masyarakat lebih mendukung dan mengurangi resistensi terhadap kenaikan tarif;
8. Memaksimalkan pendapatan melalui optimalisasi penjualan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang belum sepenuhnya tergarap. Ini bisa melengkapi pendapatan dari BLUD dan kerja sama daerah;
9. Menjalin kemitraan strategis dengan sektor swasta untuk menyediakan solusi digital dan inovasi dalam pemungutan serta pengelolaan penerimaan daerah. Kerja sama semacam ini bisa membantu optimasi proses dan meningkatkan akurasi pemungutan;
10. Penerapan prinsip good governance dalam seluruh proses pengelolaan pendapatan. Selain itu, penguatan akuntabilitas dan pelaporan keuangan yang tepat waktu dan sesuai regulasi;
11. Membangun sistem monitoring secara real-time terhadap realisasi penerimaan yang terintegrasi dengan sistem keuangan daerah guna memastikan target tahun 2026 tercapai dan memudahkan evaluasi berkala.

Selain peningkatan target pendapatan daerah yang bersumber pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan dana perimbangan dan bagi hasil serta lain-lain yang sah yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) perlu dikelola dengan sebaik-baiknya meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada PMK, selain itu dalam memaksimalkan pendapatan perlu



mengupayakan peningkatan melalui penyusunan program unggulan yang dapat dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, dimana berkaitan erat dengan aktivitas perekonomian daerah. Adapun kebijakan umum TKD Tahun 2026 antara lain :

1. Dana Bagi Hasil

- Penggunaan DBH CHT untuk bidang kesehatan sebesar 40%, termasuk untuk penurunan *stunting*;
- Pengalokasian DBH SDA berdasarkan kinerja daerah di bidang lingkungan hidup;
- Meningkatkan sinergi pengelolaan kas Pusat dan Daerah melalui penyaluran DBH berbasis kinerja;
- Meningkatkan sinergi penggunaan DBH *earmarked* (DBH CHT dan DBH DR);
- Penggunaan DBH Sawit untuk infrastruktur jalan.

2. Dana Alokasi Umum

- Melanjutkan kebijakan penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya;
- Melanjutkan dukungan pendanaan Kelurahan dan percepatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kesehatan melalui PPPK;
- Pengoptimalan peran APIP untuk pengawasan atas penganggaran dan penggunaan DAU yang telah ditentukan penggunaannya.

3. Dana Transfer Khusus

- DAK Fisik difokuskan untuk mendukung Penurunan Stunting, Kemiskinan Esktrek, dan Produktivitas Daerah;
- DAK Fisik mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan yang berkelanjutan;
- Alokasi DAK Non Fisik per daerah memperhatikan sinkronisasi kegiatan prioritas nasional dan daerah, kinerja penyerapan dan outcome, kpfis daerah serta pendanaan dari sumber TKD lainnya serta belanja KL.

4. Dana Desa

- Penggunaan Dana Desa untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrem melalui pemberian BLT Desa;



- b. Dukungan program ketahanan pangan hewani dan penanganan kesehatan masyarakat, termasuk penanganan stunting;
- c. Dukungan program sektor prioritas lain di desa termasuk pembangunan infrastruktur desa sesuai potensi dan karakteristik desa.

4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2026

Pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat pada Tahun Anggaran 2026 memberikan dampak signifikan terhadap kapasitas fiskal daerah, khususnya dalam menjaga keberlanjutan pendanaan program prioritas dan pelayanan publik. Dengan menurunnya komponen Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun potensi penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH), Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan pendapatan yang lebih adaptif, responsif, dan berorientasi pada penguatan kemandirian fiskal.

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 ditargetkan sebesar Rp7.105.259.324.284,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.214.898.770.451,00 atau 23,76 persen dari target pendapatan daerah dalam dokumen APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp9.320.158.094.735,00. Kenaikan dan penurunan target pendapatan terjadi pada kelompok, jenis dan objek pendapatan daerah sebagai berikut :

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2026 secara keseluruhan ditargetkan sebesar Rp 2.775.707.812.284,00 turun sebesar Rp1.906.223.285.451,00 atau 40,71% dari target pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.681.931.097.735,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

Penerimaan dari Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp2.340.111.659.871,00 mengalami penurunan dengan target APPD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.047.858.500.934,00. Target Pajak



Daerah pada Tahun 2026 terdiri dari target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp 330.195.800.807,00; target Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebesar Rp 314.123.710.386,00; target Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp 1.414.307.697.000,00; target Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp 14.063.591.360,00; target Pajak Rokok sebesar Rp 247.741.944.758,00; target Pajak Alat Berat (PAB) sebesar Rp 5.739.683.400,00 serta target Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebesar Rp 13.939.232.160,00.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah mengalami perubahan target dari APBD Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp8.982.364.000,00. Berikut Perkiraan Target Anggaran Pendapatan Daerah yang berasal dari Retribusi Daerah per Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026 adalah sebagaimana tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
RENCANA TARGET RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

KODE AKUN	URAIAN	TARGET TAHUN 2026 (Rp)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		8.000.000,00
4.1.02.02.012.00001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	3.600.000,00
4.1.02.02.020.00001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	3.000.000,00
4.1.02.02.020.00001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	900.000,00
4.1.02.02.020.00001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	500.000,00
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		6.000.000,00
4.1.02.02.020.00001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	6.000.000,00
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		2.145.000.000,00
4.1.02.02.006.00001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesangrahan/Vila	275.000.000,00
4.1.02.02.017.00001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	370.000.000,00
4.1.02.02.020.00001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.500.000.000,00
BADAN PENDAPATAN DAERAH		476.680.000,00
4.1.02.02.012.00001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	46.802.000,00
4.1.02.02.020.00001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	



P
E
M
E
R
I
N
T
A
H

P
R
O
V
I
N
S
I

K
A
L
I
M
A
N
T
A
N

T
E
N
G
A
H

KODE AKUN	URAIAN	TARGET TAHUN 2026 (Rp)
		429.878.000,00
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		1.500.000.000,00
4.1.02.02.020.00001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.500.000.000,00
BADAN PENGHUBUNG		450.000.000,00
4.1.02.02.006.00001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	450.000.000,00
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		50.000.000,00
4.1.02.02.012.00001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	4.800.000,00
4.1.02.02.020.00001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	45.200.000,00
BIRO UMUM		260.000.000,00
4.1.02.02.012.00001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	27.000.000,00
4.1.02.02.020.00001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	233.000.000,00
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		35.000.000,00
4.1.02.02.020.00001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	35.000.000,00
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		100.000.000,00
4.1.02.02.017.00001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	45.800.000,00
4.1.02.02.020.00001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	54.200.000,00
DINAS KEHUTANAN		609.092.000,00
4.1.02.02.006.00001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	80.000.000,00
4.1.02.02.012.00001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	5.500.000,00
4.1.02.02.017.00001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	340.542.000,00
4.1.02.02.020.00001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	183.050.000,00
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		241.400.000,00
4.1.02.02.019.00001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	8.400.000,00
4.1.02.02.020.00001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	233.000.000,00



P
E
M
E
R
I
N
T
A
H
2
0
2
6
P
R
O
V
I
N
S
I
K
A
L
I
M
A
N
T
A
N
T
E
N
G
A
H

KODE AKUN	URAIAN	TARGET TAHUN 2026 (Rp)
DINAS KESEHATAN		10.080.000,00
4.1.02.02.020.00001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	10.080.000,00
DINAS KETAHANAN PANGAN		15.000.000,00
4.1.02.02.012.00001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	6.000.000,00
4.1.02.02.020.00001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	9.000.000,00
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		15.000.000,00
4.1.02.02.020.00001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	15.000.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		140.000.000,00
4.1.02.02.019.00001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	140.000.000,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		768.372.000,00
4.1.02.02.012.00001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	12.000.000,00
4.1.02.02.019.00001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	731.372.000,00
4.1.02.02.020.00001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	25.000.000,00
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		200.000.000,00
4.1.02.02.009.00001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	200.000.000,00
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		6.000.000,00
4.1.02.02.012.00001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	6.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN		30.000.000,00
4.1.02.02.001.00005	Retribusi Pemakaian Ruangan	30.000.000,00
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		134.500.000,00
4.1.02.02.019.00001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	134.500.000,00
DINAS PERHUBUNGAN		1.000.000.000,00
4.1.02.02.008.00001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	970.000.000,00
4.1.02.02.020.00001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	30.000.000,00



KODE AKUN	URAIAN	TARGET TAHUN 2026 (Rp)
DINAS PERKEBUNAN		356.000.000,00
4.1.02.02.006.00001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	2.000.000,00
4.1.02.02.019.00001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	350.000.000,00
4.1.02.02.020.00001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	4.000.000,00
DINAS SOSIAL		40.000.000,00
4.1.02.02.001.00001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	40.000.000,00
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN		150.000.000,00
4.1.02.02.006.00001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	2.000.000,00
4.1.02.02.012.00001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	9.000.000,00
4.1.02.02.019.00001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	103.000.000,00
4.1.02.02.020.00001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	36.000.000,00
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		175.000.000,00
4.1.02.02.020.00001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	55.000.000,00
4.1.02.03.008.00001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	120.000.000,00
RSJ KALAWA ATEI		43.000.000,00
4.1.02.02.020.00001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	43.000.000,00
RSUD DR. DORIS SYLVANUS		18.240.000,00
4.1.02.02.020.00001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	18.240.000,00

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalteng, 2025

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan meliputi Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) Atas Pernyataan Modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026 ditargetkan sebesar Rp41.994.660.233,00 turun sebesar Rp18.607.707.957,00 atau 30,70% dari target APPD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp60.602.368.190,00.



d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah pada Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp384.619.128.180,00 dimana mengalami penurunan dari APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp179.334.388.431,00 atau 31,80%. Penerimaan tersebut terdiri dari penerimaan Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan; Jasa Giro; Pendapatan Bunga; Penerimaan atas Tuntutan Ganti Rugi (TGR); Pendapatan Denda Pajak dan Pendapatan BLUD.

4.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer pada KUA Tahun Anggaran 2026 ditargetkan sebesar Rp4.328.262.808.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil ditargetkan sebesar Rp2.276.532.339.000,00 dibandingkan dengan target pada tahun 2025 yaitu Rp2.141.348.419.000,00 mengalami kenaikan sebanyak 6,31 persen;
- b. Dana Alokasi Umum ditargetkan sebesar Rp1.542.974.918.000,00 mengalami penurunan sebanyak 3,71 persen dibandingkan target Tahun 2025 sebesar Rp1.602.358.047.000,00.
- c. Dana Alokasi Khusus Fisik ditargetkan sebesar Rp91.651.920.000,00 mengalami penurunan yang cukup besar sebanyak 33,31 persen dibandingkan dengan Target tahun 2025 sebesar Rp137.422.097.000,00.
- d. Dana Alokasi Khusus Non Fisik ditargetkan sebesar Rp417.103.631.000,00 masih sama dengan Target tahun 2025.

4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada KUA Tahun Anggaran 2026 ditargetkan sebesar Rp1.288.704.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan Hibah ditargetkan pada Tahun 2026 sebesar Rp1.288.704.000,00 mengalami kenaikan dari Target APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.273.716.000,00 atau 1,18%.



b. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan pada KUA Tahun 2026 tidak dianggarkan sementara pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp338.721.087.000,00.

Berikut Perkiraan Target Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026.

Tabel 4.2
RENCANA TARGET PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

KODE REKENING	U R A I A N	RENCANA TARGET PENDAPATAN DAERAH T.A. 2026 (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN	7.105.259.324.284
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.775.707.812.284
4 1 01	Pajak Daerah	2.340.111.659.871
4 1 01 01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	330.195.800.807
4 1 02 02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	314.123.710.386
4 1 03 03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	1.414.307.697.000
4 1 04 04	Pajak Air Permukaan	14.063.591.360
4 1 05 05	Pajak Rokok	247.741.944.758
4 1 05 06	Pajak Alat Berat	5.739.683.400
4 1 05 07	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB)	13.939.232.160
4 1 02	Retribusi Daerah	8.982.364.000
4 1 03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	41.994.660.233
4 1 04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	384.619.128.180
4 2	PENDAPATAN TRANSFER	4.328.262.808.000
4 2 01	Transfer Pemerintah Pusat	4.328.262.808.000
4 2 01 01	Dana Perimbangan	4.328.262.808.000
4 2 01 01 01	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	2.276.532.339.000
4 2 01 01 01 001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	246.818.295.000
4 2 1 01 01 002	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29	1.000.000.000
4 2 1 01 01 003	DBH Pasal 21	92.047.815.000
4 2 1 01 01 004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-



Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

KODE REKENING	U R A I A N	RENCANA TARGET PENDAPATAN DAERAH T.A. 2026 (Rp)
1	2	3
4 2 1 02 01 005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	-
4 2 1 02 01 006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	468.965.000
4 2 1 02 01 007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara - Landrent	35.000.000.000
4 2 1 02 01 008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara - Royalty	1.653.956.144.000
4 2 1 02 01 009	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan - Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH)	11.805.838.000
4 2 1 02 01 010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan - Dana Reboisasi (DR)	208.569.990.000
4 2 1 02 01 011	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan - Iuran Hak Penguasaan Hutan	3.000.000.000
4 2 1 02 01 011	DBH Perkebunan (Sawit)	23.865.292.000
4 2 01 01 02	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1.542.974.918.000
4 2 2 01 02 001	Dana Alokasi Umum	1.542.974.918.000
4 2 01 01	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	91.651.920.000
4 2 01 01 03	DAK Bidang Insfrastruktur Jalan	-
4 2 01 01 03	DAK Penugasan Bidang Insfrastruktur Irigasi	-
4 2 01 01 03 030	DAK Tematik Pengembangan Food Estate	-
4 2 01 01 03	DAK Penugasan Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB)	-
4 2 01 01 03 0	Bapelkes	-
4 2 01 01 03 0	Pelayanan Kesehatan Farmasian	-
4 2 01 01 03 022	Penguatan Intervensi Stunting (Reguler)	-
4 2 01 01 03	DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-
4 2 01 01 03 031	Lingkungan Hidup	-
4 2 01 01 03 032	Kehutanan	-
4 2 01 01 03	DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB	71.640.869.000
4 2 01 01 03 021	Rumah Sakit Rujukan	-
4 2 01 01 03 0	Bapelkes	-



Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

KODE REKENING	U R A I A N	RENCANA TARGET PENDAPATAN DAERAH T.A. 2026 (Rp)
1	2	3
4 2 01 01 03 012	Pelayanan Kesehatan Dasar (Reguler)	-
4 2 01 01 03 013	Pelayanan Kesehatan Rujukan (Reguler)	-
4 2 01 01 03 014	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Intervensi Stunting (Reguler)	-
4 2 01 01 03 0	Penguatan sistem dan kapasitas pelayanan kesehatan	-
4 2 01 01 03	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	-
4 2 01 01 03	DAK Bidang Pertanian	-
4 2 01 01 03	DAK Bidang Energi Skala Kecil Pedesaan	-
4 2 01 01 03	DAK Bidang Pendidikan	20.011.051.000
4 2 01 01 03 003	Pendidikan SMA (Reguler)	2.594.891.000
4 2 01 01 03 0	Pendiidikan SMK (Reguler)	17.198.800.000
4 2 01 01 03 020	Pendidikan SMK (Penugasan)	-
4 2 01 01 03 0	Pendidikan SMA (Afirmasi)	-
4 2 01 01 03 004	Pendidikan SLB/SMALB (Reguler)	217.360.000
4 2 01 01 03 006	Perpustakaan Daerah (Reguler)	-
4 2 01 01 03	DAK Bidang Pariwisata	-
4 2 01 01 03	DAK Bidang Pasar	-
4 2 01 01 04	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	417.103.631.000
4 2 01 01 04 001	DAK Non Fisik - Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	177.416.013.000
4 2 01 01 04 011	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan	5.281.471.000
4 2 01 01 04 001	DAK Non Fisik – Ketahanan Pangan dan Pertanian	150.000.000
4 2 01 01 04 018	DAK Non Fisik - Pelayanan Administrasi Kependudukan	-
4 2 01 01 04 009	DAK Non Fisik - Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Budaya	4.957.400.000
4 2 01 01 04 006	DAK Non Fisik - Tunjangan Profesi Guru	219.111.745.000
4 2 01 01 04 0	DAK Non Fisik - Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660.000



KODE REKENING	U R A I A N	RENCANA TARGET PENDAPATAN DAERAH T.A. 2026 (Rp)
1	2	3
4 2 01 01 04 0	DAK Non Fisik - Bantuan Operasional Keluarga Berencana	200.000.000
4 2 01 01 04 0	DAK Non Fisik - Tambahan Penghasilan Guru	4.474.500.000
4 2 01 01 04 0	DAK Non Fisik - Tunjangan Khusus Guru	5.111.842.000
4 2 01 01 04 0	DAK Non Fisik - Dana Pelayanan Kepariwisataaan	-
4 2 01 02	Dana Insentif Daerah	-
4 2 01 02 01	Dana Insentif Daerah	-
4 2 02	Transfer Antar - Daerah	-
4 2 02 01	Pendapatan Bagi Hasil	-
4 2 02 01	Pendapatan Bagi Hasil	-
4 2 02 02	Bantuan Keuangan	-
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.288.704.000
4 3 01	Pendapatan Hibah	1.288.704.000
4 3 01 01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat	-
4 3 01 01 01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-
4 3 1 04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	1.288.704.000
4 3 1 04 01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri PT. Jasa Raharja	1.288.704.000
4 3 1 05	Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga	-
4 3 1 05 01	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis Dealer Kendaraan Bermotor	-
4 3 03	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-
4 3 03 01	Lain-lain Pendapatan	-
4 3 03 01 02	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah	-
4 3 03 01 02	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada BUMD	-



Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

KODE REKENING	U R A I A N	RENCANA TARGET PENDAPATAN DAERAH T.A. 2026 (Rp)
1	2	3
4 3 03 01 02	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	-
	JUMLAH	7.105.259.324.284

P
E
M
E
R
I
N
T
A
H

P
R
O
V
I
N
S
I

K
A
L
I
M
A
N
T
A
N

T
E
N
G
A
H

K
U
A
T
A

2
0
2
6



BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Belanja Daerah

5.1.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

Kebijakan perencanaan belanja daerah Tahun Anggaran 2026 disusun dengan mempertimbangkan kondisi fiskal yang menghadapi tantangan signifikan akibat pengurangan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat. Penurunan alokasi Dana Transfer, termasuk DAU, DAK, dan DBH tertentu, berdampak langsung pada kemampuan fiskal daerah dalam membiayai layanan publik dan program prioritas. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian arah kebijakan belanja yang lebih selektif, efisien, dan fokus pada capaian kinerja yang strategis. Untuk itu, belanja daerah tahun 2026 diarahkan pada penajaman prioritas dan pemenuhan layanan dasar, dengan mengutamakan sektor-sektor yang wajib dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Pemerintah Daerah memperkuat fokus pada pendidikan, kesehatan, penurunan stunting, perlindungan sosial, infrastruktur dasar, serta penguatan ketahanan pangan dan lingkungan. Program yang kurang produktif dan tidak mendukung target kinerja utama akan dirasionalisasi.

Dalam hal menjaga stabilitas fiskal, Pemerintah Daerah menerapkan kebijakan efisiensi belanja melalui pengendalian belanja operasional, penataan ulang kegiatan rutin, serta penerapan prinsip *value for money* dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Upaya efisiensi juga diperkuat oleh digitalisasi layanan, integrasi sistem informasi, serta eliminasi duplikasi program antar-perangkat daerah. Selain itu, Pemerintah Daerah mendorong penguatan kemandirian pembiayaan melalui pendirian dan optimalisasi BLUD pada unit-unit layanan potensial. Penerapan pola BLUD memberikan fleksibilitas keuangan, mendorong peningkatan kualitas layanan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada APBD di tengah menurunnya Dana Transfer. BLUD diarahkan pada sektor kesehatan, perhubungan, pendidikan, laboratorium, dan layanan teknis lainnya.

Penyusunan kebijakan umum APBD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah disesuaikan dengan ketentuan mengenai klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan



keuangan daerah. Adapun penambahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Kepala Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Kebijakan Umum APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026, menggunakan klasifikasi, kodefikasi sub kegiatan, kegiatan dan program sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klafikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

Secara umum kebijakan belanja daerah diarahkan untuk:

1. Menopang proses pembangunan yang berkelanjutan;
2. Ketersediaan pendanaan pelayanan dasar secara memadai;
3. Ketersediaan pendanaan untuk program yang menyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta berbasis lingkungan (keberlanjutan).

Penganggaran belanja daerah Tahun 2026, diarahkan antara lain:

1. Kebijakan terkait Pemenuhan Belanja Mengikat dan Belanja Wajib :
 - a. pemenuhan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
 - b. Pemenuhan belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
2. Kebijakan terkait Pemenuhan Belanja Prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran :
 - a. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.



- P
E
M
E
R
I
N
T
A
H
P
R
O
V
I
N
S
I
K
A
L
I
M
A
N
T
A
N
T
E
N
G
A
H
- 2
0
2
6
- K
U
A
T
A
- b. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Provinsi Kalimantan Tengah.
 - c. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
 - d. Peningkatan Pembangunan Ekonomi Desa melalui Koperasi Merah Putih serta mendorong program untuk mendukung kapasitas tenaga kerja yang selaras dengan potensi daerah serta kewirausahaan UMKM.
 - e. Pemenuhan program prioritas Gubernur Kalimantan Tengah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas perekonomian, Sumber Daya Manusia, dan Kesehatan secara berkelanjutan, efektif dan efisien dalam bingkai *spirit* kearifan lokal melalui Program Kartu Huma Betang Sejahtera secara terpadu dan terintegrasi.
 - f. Mengakomodir program prioritas pembangunan yang dijangkit melalui Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang.
 - g. Mengakomodir hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD, yang merupakan hasil kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang dituangkan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
3. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah, yaitu:
- a. Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya ATK, listrik, telepon, air bersih, internet, dan operasional kendaraan);
 - b. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pengendalian & evaluasi, dan perencanaan;



- c. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas, program dan kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Daerah
4. Mengalokasikan Belanja Operasi dan Belanja Modal yang digunakan untuk pelaksanaan urusan pemda, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja Operasi terdiri dari belanja pegawai (gaji dan tunjangan PNS), belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial. Belanja Operasi dan Belanja Modal dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemda kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, ASB, dan standar satuan harga. Standar satuan harga ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD.
5. Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk penanggulangan bencana dan hal-hal tidak terduga lainnya seperti bantuan sosial yang tidak direncanakan.
6. Belanja Transfer yang meliputi belanja bagi hasil kab/kota untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kota atau pendapatan kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki dan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau desa dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dengan prinsip proporsional, pemerataan, dan penyeimbang. Bantuan keuangan yang dimaksud terdiri atas Bantuan Keuangan antar-Daerah provinsi, Bantuan Keuangan antar-Daerah kabupaten/kota, Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya, Bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya, dan/atau Bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.



Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut :

a. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Penganggaran harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya secara efisien dalam melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b. Prioritas

Penggunaan anggaran belanja diprioritaskan untuk memenuhi *mandatory spending* yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, selain itu diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

c. Tolak Ukur dan Target Kinerja

Dalam penentuan bobot belanja pada tiap Perangkat Daerah melihat tolak ukur dan target pada setiap indikator kinerja meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang bertujuan agar tercapainya kinerja utama pada akhir periode jabatan Kepala Daerah.

d. Optimalisasi Belanja

Optimalisasi belanja untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efektif dan efisien. Dimana belanja daerah disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

e. Transparansi dan Akuntabel

Dalam rencana pengeluaran belanja daerah dapat dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

5.1.2. Rencana Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026



Rencana **Belanja Daerah** Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar **Rp7.371.706.548.944,00** mengalami penurunan anggaran dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.848.451.545.790,35 atau 27,87%. Hal ini menggambarkan upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan kemampuan keuangan dengan kebutuhan prioritas pembangunan, menjaga stabilitas fiskal serta meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran. yang terdiri dari:

- **Belanja Operasi** pada Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar **Rp3.971.504.178.331,85** mengalami penurunan dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp5.433.678.700.466,00**.
- **Belanja Modal** pada KUA PPAS Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar **Rp679.999.584.468,75** mengalami penurunan dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2025, dimana APBD sebesar **Rp3.131.639.721.405,00**.
- **Belanja Tidak Terduga** pada KUA PPAS Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar **Rp60.000.000.000,00** mengalami penurunan dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp131.600.034.400,00**.
- **Belanja Transfer** pada KUA PPAS Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar **Rp2.660.202.786.143,40** mengalami kenaikan dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp1.523.239.638.464,00**.

5.1.3. Kebijakan Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai terdiri dari Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS, Belanja Penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk Uang Representasi dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD, Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Biaya Pemungutan Pajak Daerah. Belanja Pegawai pada APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar



Rp1.950.502.378.171,01 penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, mutasi dan rencana kenaikan tunjangan untuk PKKK dan tunjangan guru dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5 % (dua koma lima persen) dari jumlah pegawai.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa dianggarkan sebesar Rp1.665.245.258.113,84 digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaat kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang atau jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja barang dan jasa pada APBD Tahun Anggaran 2026 mengalami penurunan sebesar 30,34 persen dari APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.390.599.242.196,00.

c. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi pada APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp60.650.000.000,00. Belanja subsidi ini diperuntukkan untuk menekan inflasi dan meningkatkan daya beli masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah. Belanja subsidi pada APBD Tahun Anggaran 2026 mengalami penurunan sebesar 20,39 persen dari APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp76.181.503.510,00.

d. Belanja Hibah

- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 465);
- Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah



lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus. Uang dan barang yang diberikan dalam bentuk hibah harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.

- Hibah dalam bentuk uang, barang dan jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dapat diberikan dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintah di daerah dan layanan dasar umum sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- Hibah dapat diberikan kepada perusahaan daerah dalam rangka menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi swasta atau kelompok masyarakat/ perorangan sepanjang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
- Pemberian hibah dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- Belanja Hibah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dialokasikan belanjanya di perangkat daerah masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- Belanja Hibah pada APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp156.084.864.769,00 mengalami penurunan sebesar Rp982.662.493.805,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2025.

e. Belanja Bantuan Sosial

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terakhir dengan diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- Bantuan sosial untuk organisasi kemasyarakatan harus selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya. Pemberian bantuan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran pada organisasi kemasyarakatan yang sama.
- Untuk memenuhi fungsi APBD sebagai instrumen keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, bantuan dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna terpenuhinya standar pelayanan minimal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- Belanja Bantuan Sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dialokasikan belanjanya di perangkat daerah masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- Belanja Bantuan Sosial pada APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp139.021.677.278,00 mengalami kenaikan dari APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp64.214.904.283,00.

f. Belanja Bagi Hasil

- Belanja bagi hasil digunakan untuk mengalokasikan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Penyaluran Belanja Bagi Hasil berpedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
- Belanja Bagi Hasil yaitu belanja bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota, terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), pajak bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Kendaraan Atas Air (PKAA),



Bea Balik Nama Kendaraan Atas Air (BBN-KAA), Pajak Air Permukaan/Pajak Air bawah tanah (PAP/PABT) berdasarkan target penerimaan provinsi.

- Belanja Bagi Hasil ini pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp2.586.409.386.143,40 mengalami penurunan dibandingkan dengan target APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 1.494.709.638.464,00.

g. Belanja Bantuan Keuangan

- Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa dan Kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan.
- Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ ditetapkan oleh pemerintah pemberi bantuan. Untuk pemberi bantuan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.
- Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD,



Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

- Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa pada Tahun Anggaran 2026 dianggarkan Rp73.793.400.000,00 mengalami penurunan dibandingkan dengan target APBD Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp 28.530.000.000,00. Bantuan Keuangan ini terdiri dari Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota untuk pemberian Insentif Damang, Sekretaris Damang, Mantir dan Mantir Desa; Bantuan Keuangan Kepada tentang Pemberian Insentif kepada Ketua RT dan Bantuan Kepada Kabupaten/Kota tentang Pemberian Insentif kepada Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

h. Belanja Tidak Terduga

- Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2025 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam, non alam, bantuan sosial yang tidak direncanakan dan bencana sosial yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2026.
- Pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2026, Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp60.000.000.000,00 mengalami penurunan dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp 131.600.034.400,00.

5.1.4. Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah

a. Kebijakan Pembangunan Daerah

Penyusunan prioritas pembangunan daerah harus memenuhi berbagai kriteria pokok maupun *optional* sesuai perkembangan pembangunan saat ini. Kriteria yang digunakan dalam penyusunan



prioritas untuk Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Merupakan penerjemahan dan pelaksanaan dari RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dalam mencapai visi dan misi pembangunan melalui tahapan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan yang berlaku;
2. Rencana pembangunan disusun berbasis kinerja dan prinsip pembangunan yang berkelanjutan serta bersinergis antara program prioritas daerah dengan program prioritas nasional.
3. Pengalokasian penganggaran indikatif rencana program/kegiatan berbasiskan *money follow program priority* agar terciptanya perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien.
4. Mengutamakan isu strategis pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah diantaranya pengembangan perekonomian daerah, peningkatan kualitas SDM dan tenaga kerja yang berdaya saing, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, peningkatan cadangan pangan baru, percepatan pembangunan infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan.
5. Selaras dengan prioritas pembangunan nasional untuk mencapai sasaran pembangunan nasional;
6. mendukung pelaksanaan program strategis nasional sebagaimana diamanatkan dalam RKP 2026;
7. Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah mendesak pada tahun 2026; serta
8. Pengembangan sektor atau bidang yang terkait dengan keunggulan kompetitif daerah.

b. Isu Strategis Pembangunan Kalimantan Tengah Tahun 2026 yang dihadapi

1. Pengembangan Kawasan sentra produksi pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan, baik untuk kepentingan lokal Provinsi Kalimantan Tengah maupun untuk kepentingan nasional;
2. Peningkatan pemenuhan pelayanan dasar, infrastruktur dasar dan konektivitas;



3. Peningkatan kualitas SDM dalam pemenuhan kebutuhan produksi maupun pelayanan publik dan tata Kelola pemerintahan daerah;
4. Peningkatan upaya mitigasi bencana;
5. Pengembangan sektor unggulan dan hilirisasi komoditas berbasis sumber daya alam;
6. Pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19 dan antisipasi perkiraan resesi ekonomi global;
7. Penurunan angka stunting dan penanggulangan kemiskinan;
8. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai bagian dari upaya perbaikan tata Kelola Pemerintahan.

c. Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah

Pembangunan Tahun 2026 merupakan tahun awal masa Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah dilaksanakan PILKADA Serentak pada Tahun 2025. Dalam dokumen RPJPD yang mengacu pada tahapan RPJM 2025-2029, pembangunan daerah diarahkan untuk menciptakan masyarakat Kalimantan Tengah yang mandiri, maju, dan adil melalui percepatan pembangunan di berbagai sektor. Hal ini difokuskan pada pembentukan struktur perekonomian yang kokoh, berbasis keunggulan kompetitif di setiap wilayah, dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta memiliki daya saing. Untuk memastikan pelaksanaan, pencapaian, dan keberlanjutan program hingga target tahun 2026, fokus pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun tersebut diarahkan pada “Membangun Fondasi Inovasi dan Hilirisasi Berkelanjutan Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif.” Prioritas pembangunan tahun 2026 pun disusun berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan 2025-2029 dan diselaraskan dengan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah 2025-2045, serta diharapkan juga sejalan dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah yang nantinya akan dirumuskan oleh kepala daerah terpilih. Selain itu, program pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 sudah diselaraskan dengan Program Prioritas Nasional yang tertuang pada Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026 yang dapat dilihat pada Tabel 5.1 dibawah ini.

Tabel 5.1



Penyelerasan Program Prioritas Daerah Huma Betang dan Program Prioritas Nasional

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS DAERAH “HUMA BETANG”
1.	KETAHANAN PANGAN	BETANG MAKMUR : a. Rp2 Juta per Kartu Keluarga Bantuan Pangan; b. Operasi Pasar Murah; c. Asuransi Petani dan Nelayan; d. Bantuan Perahu dan Alat Tangkap
2.	PENDIDIKAN	BETANG MAKMUR : a. 250 Miliarder Muda Baru; b. <i>Milenial Job Center</i> BETANG CERDAS : a. Sekolah/Kuliah Gratis; b. Satu Keluarga Harus Ada Sarjana; c. 1.000 Rumah Guru; d. Insentif Guru Agama; e. Kalteng Mengaji
3.	KESEHATAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH	BETANG MAJU : a. Peningkatan Infrastruktur Air Bersih Desa; BETANG SEHAT : a. Berobat Gratis Berbasis KTP; b. Intensif Tenaga Kesehatan Desa; c. Revitalisasi Puskesmas Desa; d. Pendampingan Ibu Hamil dan Pascahamil; e. Satu Desa Satu Ambulan
4.	PEMBANGUNAN DESA, KOPERASI, DAN UMKM	BETANG MAJU : a. Pembangunan 1000 Km Jalan Desa; b. Revitalisasi Infrastruktur Lintas Kabupaten dan Kota; c. Peningkatan Infrastruktur Air Bersih Desa; d. Peningkatan Akses Listrik Desa; e. Akses Sinyal dan Internet Daerah Pedalaman BETANG MAKMUR : a. Inkubasi UMKM BETANG HARMONI : a. Berdayakan 100 Dewi (Desa Wisata); b. Rp150 Miliar Bantuan Provinsi untuk Kabupaten Kota; c. Bantuan dana Rp250 Juta Stimulus Desa; d. Intensif Kepala Desa, BPD, Damang, Mantir, dan RT/RW se-Provinsi Kalimantan Tengah; e. Layanan Cepat Tanggap Kebakaran Lahan dan Bantuan Warga
5.	PERCEPATAN INVESTASI	KALTENG BERMARTABAT : a. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Sumber : RKPD Kalteng Tahun 2026 dan KEM PPKF Tahun 2026

1. Penciptaan Iklim Investasi yang Menarik



- a. Implementasi awal membutuhkan integrasi yang lebih cepat antara kebijakan investasi dengan program sektoral, sehingga dampak positif dapat dirasakan secara berkelanjutan.
 - b. Inisiasi di tahun awal mendukung perbaikan infrastruktur, tata kelola, dan kualitas pelayanan publik, sehingga memperkuat daya saing daerah di mata investor
2. Efisiensi Faktor Produksi
 - a. Dengan potensi SDM yang besar, optimalisasi faktor produksi memungkinkan transformasi bonus demografi menjadi output ekonomi produktif melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan.
 - b. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya mendukung transformasi ekonomi yang ramah lingkungan dan inklusif, menciptakan dasar pembangunan jangka panjang yang berkesinambungan
 3. Penciptaan UMKM dan Sektor Privat
 - a. Memfasilitasi kebutuhan UMKM dan sektor privat guna menciptakan sinergi yang memperkuat diversifikasi ekonomi
 - b. Menyediakan dasar bagi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan mengintegrasikan peran sektor swasta, yang akan menjadi fondasi penting bagi rencana pembangunan jangka pendek (2026) yang harus selaras dengan visi jangka menengah daerah
 4. Politik Anggaran Meningkat dari Sumber Daya Lokal
 - a. Dengan mengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari potensi lokal, daerah dapat mengurangi ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat dan memperkuat kemandirian fiskal. Hal ini memungkinkan daerah untuk lebih leluasa mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan lokal.
 - b. Pengembangan anggaran berbasis sumber daya lokal membuka peluang untuk mengoptimalkan sektor-sektor unggulan daerah, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lapangan kerja baru



5.1.5. Kebijakan Belanja berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah (Urusan Wajib dan Urusan Pilihan) dan Perangkat Daerah

Belanja daerah berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan komponen belanja operasi dan modal. Penganggaran belanja operasi dan modal dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah tahun 2026 tersebut dialokasikan dengan pertimbangan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
2. Penyusunan belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pilihan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah dalam upaya memenuhi kewajiban daerah di luar urusan wajib, yang mencakup peningkatan pertanian dalam arti luas, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, perindustrian dan perdagangan serta transmigrasi.
3. Penyusunan belanja daerah berdasarkan Perangkat Daerah (PD) digunakan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi PD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya. Pengalokasian anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap PD harus terukur, yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5.1.6. Kebijakan Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Adapun prinsip Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 pada pasal 1 disebutkan bahwa SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran. Pada Tahun 2026



Pemerintah Provinsi telah mengalokasikan belanja untuk pemenuhan SPM sebesar Rp189.308.233.042,01. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2
Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

NAMA SKPD	SPM	NAMA LAYANAN SPM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PENDIDIKAN	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	500.000.000,00
	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	300.000.000,00
	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Ruang Kelas Baru	750.000.000,00
	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	11.592.200.000,00
	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	30.000.000.000,00
	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	84.000.000.000,00
	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.000.000.000,00
	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.000.000.000,00
	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	500.000.000,00
	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Ruang Kelas Baru	500.000.000,00
	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	482.900.000,00



NAMA SKPD	SPM	NAMA LAYANAN SPM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.153.800.000,00
	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	2.900.000.000,00
	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	300.000.000,00
	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.000.000.000,00
	SPM Bidang Pendidikan	Keamanan, Kebinekaan, dan Inklusivitas	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	500.000.000,00
	SPM Bidang Pendidikan	Keamanan, Kebinekaan, dan Inklusivitas	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	1.750.000.000,00
	SPM Bidang Pendidikan	Keamanan, Kebinekaan, dan Inklusivitas	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	359.900.000,00
	SPM Bidang Pendidikan	Keamanan, Kebinekaan, dan Inklusivitas	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	500.000.000,00
	SPM Bidang Pendidikan	Keamanan, Kebinekaan, dan Inklusivitas	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	1.000.000.000,00
	SPM Bidang Pendidikan	Keamanan, Kebinekaan, dan Inklusivitas	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	250.000.000,00
	SPM Bidang Pendidikan	Keamanan, Kebinekaan, dan Inklusivitas	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	500.000.000,00
	SPM Bidang Pendidikan	Keamanan, Kebinekaan, dan Inklusivitas	Pengelolaan Pendidikan Sekolah	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan	300.000.000,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
K U A T A 2 0 2 6

NAMA SKPD	SPM	NAMA LAYANAN SPM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
			Menengah Kejuruan	perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
	SPM Bidang Pendidikan	Keamanan, Kebinekaan, dan Inklusivitas	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	800.000.000,00
	SPM Bidang Pendidikan	Keamanan, Kebinekaan, dan Inklusivitas	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.500.000.000,00
	SPM Bidang Pendidikan	Keamanan, Kebinekaan, dan Inklusivitas	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1.650.000.000,00
	SPM Bidang Pendidikan	Keamanan, Kebinekaan, dan Inklusivitas	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	250.000.000,00
	SPM Bidang Pendidikan	Keamanan, Kebinekaan, dan Inklusivitas	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	250.000.000,00
	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	5.341.100.000,00
	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	4.000.000.000,00
	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	350.000.000,00
	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	4.000.000.000,00
	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	579.700.000,00
	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	500.000.000,00



K
U
A
T
A

2
0
2
6

P
E
M
E
R
I
N
T
A
H

P
R
O
V
I
N
S
I

K
A
L
I
M
A
N
T
A
N
T
E
N
G
A
H

NAMA SKPD	SPM	NAMA LAYANAN SPM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
DINAS PENDIDIKAN	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	300.000.000,00
	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	5.000.000.000,00
	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	500.000.000,00
	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	500.000.000,00
	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	600.000.000,00
	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	200.000.000,00
	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	200.000.000,00
	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	550.000.000,00
DINAS KESEHATAN	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	2.024.965.000,00
	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	175.035.000,00



K
U
A
T
A
2
0
2
6

NAMA SKPD	SPM	NAMA LAYANAN SPM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	1.500.000.000,00
	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.000.000.000,00
	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	3.500.000.000,00
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	141.500.000,00
	SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	195.416.830,00
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pelayanana Ketenteraman dan Keteriban Umum Provinsi	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	250.000.000,00
	SPM Bidang Ketenteraman dan	Pelayanana Ketenteraman dan Keteriban Umum Provinsi	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan	50.000.000,00



K
U
A
T
A

2
0
2
6

P
E
M
E
R
I
T
A
H

P
R
O
V
I
N
S
I

K
A
L
I
M
A
N
T
A
N
T
E
N
G
A
H

DINAS SOSIAL

NAMA SKPD	SPM	NAMA LAYANAN SPM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
	Ketertiban Umum		Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Peraturan Kepala Daerah	
	SPM Bidang Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Pelayanan Dukungan Psikososial	150.000.000,00
	SPM Bidang Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penyediaan Permakanan	100.000.000,00
	SPM Bidang Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penyediaan Sandang	100.000.000,00
	SPM Bidang Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	100.000.000,00
	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	8.889.010,01
	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	19.333.000,00
	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	1.500.000,00
	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	53.520.000,00
	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	56.179.520,00



NAMA SKPD	SPM	NAMA LAYANAN SPM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	22.154.210,00
	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	30.000.000,00
	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	30.000.000,00
	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Pengasuhan	55.200.000,00
	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	32.373.155,00
	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	13.809.800,00
	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	452.913.905,00
	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Sandang	94.616.712,00
	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Akses ke Layanan Kesehatan Dasar	1.500.000,00
	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar	2.500.000,00
	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	28.060.000,00
	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	10.000.000,00
	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	24.000.000,00
	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia		



K U A
T A
2 0 2 6
P E M E R I N T A H
P R O V I N S I
K A L I M A N T A N
T E N G A H

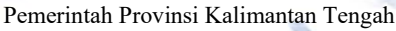
NAMA SKPD	SPM	NAMA LAYANAN SPM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
			Terlantar di dalam Panti		
	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	15.000.000,00
	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	15.000.000,00
	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemulasaraan	74.000.000,00
	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Alat Bantu	5.000.000,00
	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	50.000.000,00
	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	25.000.000,00
	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	900.000.000,00
	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Sandang	80.000.000,00
	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	85.000.000,00
	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	1.500.000,00



NAMA SKPD	SPM	NAMA LAYANAN SPM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	81.368.000,00
	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	85.802.000,00
	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	40.000.000,00
	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	25.000.000,00
	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	25.000.000,00
	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	40.000.000,00
	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	1.005.000.000,00
	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Sandang	90.000.000,00
	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	10.000.000,00



NAMA SKPD	SPM	NAMA LAYANAN SPM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	32.496.400,00
	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	35.000.500,00
	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	35.000.000,00
	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	4.500.000,00
	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Pemulangan ke Daerah Asal	51.000.000,00
	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Penyediaan Asrama/ Wisma yang Mudah Diakses	2.500.000,00
	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	5.000.000,00
	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	50.000.000,00
	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Penyediaan Sandang	7.000.000,00



Kebijakan Belanja untuk Pengentasan Kemiskinan Ekstrem adalah strategi pemerintah atau lembaga yang bertujuan untuk mengalokasikan dana secara langsung kepada individu atau keluarga yang hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrem. Pada Tahun 2026 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengalokasikan Rp1.417.901.592.880,91. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memberikan bantuan finansial yang dapat langsung mengurangi tingkat kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut dapat dilihat kebijakan belanja yang disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk pengentasan kemiskinan ekstrem pada Tabel 5.3 Belanja Pemenuhan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.

Tabel 5.3

DINAS PENDIDIKAN



NAMA SKPD	KODE KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SIFAT	PAGU
	1.01.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Penunjang	500.000.000,00
	1.01.02.1.01.0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Penunjang	300.000.000,00
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Penunjang	300.000.000,00
	1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Penunjang	250.000.000,00
	1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Tidak Langsung	500.000.000,00
	1.01.02.1.01.0066	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Langsung	600.000.000,00
	1.01.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Tidak Langsung	1.000.000.000,00
	1.01.02.1.01.0070	Pembangunan Ruang Laboratorium	Tidak Langsung	250.000.000,00
	1.01.02.1.01.0071	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Tidak Langsung	250.000.000,00
	1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Tidak Langsung	750.000.000,00
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Langsung	500.000.000,00
	1.01.02.1.02.0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Tidak Langsung	482.900.000,00
	1.01.02.1.02.0005	Pembangunan Ruang Laboratorium	Tidak Langsung	500.000.000,00
	1.01.02.1.02.0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Tidak Langsung	500.000.000,00
	1.01.02.1.02.0007	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Tidak Langsung	500.000.000,00
	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Tidak Langsung	4.153.800.000,00
	1.01.02.1.02.0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Tidak Langsung	300.000.000,00
	1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah	Tidak Langsung	1.500.000.000,00
	1.01.02.1.02.0030	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Tidak Langsung	2.000.000.000,00



NAMA SKPD	KODE KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SIFAT	PAGU
	1.01.02.1.02.0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Langsung	2.900.000.000,00
	1.01.02.1.02.0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Langsung	1.650.000.000,00
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Tidak Langsung	1.500.000.000,00
	1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Tidak Langsung	56.985.201.000,00
	1.01.02.1.02.0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Penunjang	200.000.000,00
	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Penunjang	500.000.000,00
	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Penunjang	250.000.000,00
	1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Tidak Langsung	300.000.000,00
	1.01.02.1.02.0060	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Langsung	500.000.000,00
	1.01.02.1.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Langsung	550.000.000,00
	1.01.02.1.02.0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Tidak Langsung	5.000.000.000,00
	1.01.02.1.02.0063	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	Tidak Langsung	250.000.000,00
	1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Tidak Langsung	500.000.000,00
	1.01.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Tidak Langsung	300.000.000,00
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Langsung	200.000.000,00
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Tidak Langsung	4.000.000.000,00
	1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Tidak Langsung	7.780.700.000,00



NAMA SKPD	KODE KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SIFAT	PAGU
	1.01.02.1.03.0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Penunjang	579.700.000,00
	1.01.02.1.03.0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Penunjang	350.000.000,00
	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Penunjang	500.000.000,00
	1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Penunjang	359.900.000,00
	1.01.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Tidak Langsung	500.000.000,00
	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Langsung	500.000.000,00
	1.01.05.1.02.0003	Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penunjang	4.000.000.000,00
DINAS KESEHATAN	1.02.02.1.01.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tidak Langsung	150.000.000,00
	1.02.02.1.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tidak Langsung	90.000.000,00
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Tidak Langsung	500.000.000,00
	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Tidak Langsung	615.078.241,00
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Tidak Langsung	4.719.134.759,00



NAMA SKPD	KODE KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SIFAT	PAGU
	1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Langsung	2.024.965.000,00
	1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Langsung	175.035.000,00
	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Langsung	1.349.035.000,00
	1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Langsung	250.000.000,00
	1.02.02.1.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Langsung	646.000.000,00
	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Penunjang	333.787.000,00
	1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Penunjang	100.000.000,00
	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Penunjang	230.000.000,00
	1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Penunjang	316.275.836,00
	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Penunjang	1.225.556.000,00
	1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Langsung	150.000.000,00
	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Penunjang	42.174.962.889,00
	1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Penunjang	228.260.000,00
	1.02.02.1.02.0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Penunjang	678.655.130,00
	1.02.02.1.02.0020	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Penunjang	165.000.000,00



NAMA SKPD	KODE KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SIFAT	PAGU
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Penunjang	344.260.810,00
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tidak Langsung	6.929.558.520,00
	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Penunjang	80.000.000,00
	1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penunjang	221.219.200,00
	1.02.05.1.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Penunjang	95.932.000,00
RSUD DR. DORIS SYLVANUS	1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Tidak Langsung	1.000.000.000,00
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Tidak Langsung	4.567.588.102,00
	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Tidak Langsung	3.381.835.490,00
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Tidak Langsung	15.000.000.000,45
	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Penunjang	3.750.000.000,00
	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Penunjang	200.000.000,00
	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Penunjang	13.000.000.000,00
	1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Penunjang	25.000.000,00
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber	Tidak Langsung	5.855.509.061,00



NAMA SKPD	KODE KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SIFAT	PAGU
		Daya Manusia Kesehatan		
RSJ KALAWA ATEI	1.02.02.1.01.0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Tidak Langsung	100.000.000,00
	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Tidak Langsung	200.000.000,00
	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit	Tidak Langsung	574.850.370,00
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Tidak Langsung	1.537.051.819,99
	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Penunjang	100.000.000,00
	1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Langsung	100.000.000,00
	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Penunjang	1.500.000.000,00
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Penunjang	300.000.000,00
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tidak Langsung	700.000.000,00
RSUD HANAU	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Penunjang	2.500.000.000,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02.1.01.0079	Normalisasi/Restorasi Sungai	Tidak Langsung	600.000.000,00
	1.03.02.1.01.0095	Rehabilitasi Unit Air Baku	Tidak Langsung	400.000.000,00
	1.03.02.1.01.0109	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Tidak Langsung	1.300.000.000,00
	1.03.02.1.01.0127	Pembangunan Bangunan Pengamanan Pantai	Tidak Langsung	4.000.000.000,00
	1.03.02.1.01.0136	Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Penunjang	967.500.000,00
	1.03.02.1.02.0016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Tidak Langsung	7.000.000.000,00



NAMA SKPD	KODE KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SIFAT	PAGU
	1.03.02.1.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Tidak Langsung	500.000.000,00
	1.03.02.1.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Tidak Langsung	4.789.000.000,00
	1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Penunjang	1.200.000.000,00
	1.03.02.1.02.0043	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Irigasi	Penunjang	1.435.500.000,00
	1.03.03.1.01.0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Penunjang	1.500.000.000,00
	1.03.03.1.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Penunjang	1.000.000.000,00
	1.03.04.1.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA	Tidak Langsung	7.000.000.000,00
	1.03.05.1.01.0022	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	Penunjang	3.500.000.000,00
	1.03.06.1.01.0010	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Tidak Langsung	2.100.000.000,00
	1.03.06.1.01.0011	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Tidak Langsung	776.554.000,00
	1.03.07.1.01.0026	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Tidak Langsung	3.800.000.000,00
	1.03.09.1.01.0019	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penunjang	160.750.000.000,00
	1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan	Tidak Langsung	260.911.718.400,00



NAMA SKPD	KODE KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SIFAT	PAGU
	1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Penunjang	3.588.281.600,00
	1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Penunjang	2.500.000.000,00
	1.03.10.1.01.0045	Pemeliharaan Rutin Jalan	Tidak Langsung	15.000.000.000,00
	1.03.10.1.01.0046	Penggantian Jembatan	Tidak Langsung	21.500.000.000,00
	1.03.10.1.01.0053	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Penunjang	9.000.000.000,00
	1.03.10.1.01.0054	Pembangunan Jembatan	Tidak Langsung	45.000.000.000,00
	1.03.10.1.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan	Tidak Langsung	18.000.000.000,00
	1.03.10.1.01.0057	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Tidak Langsung	2.500.000.000,00
	1.03.11.1.01.0010	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Penunjang	187.000.000,00
	1.03.11.1.01.0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Penunjang	280.000.000,00
	1.03.11.1.01.0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Penunjang	329.000.000,00
	1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Penunjang	1.150.000.000,00
	1.03.11.1.02.0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Penunjang	60.000.000,00
	1.03.11.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	Penunjang	70.000.000,00
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.04.02.1.01.0008	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Penunjang	141.500.000,00
	1.04.02.1.01.0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Penunjang	195.416.830,00
	1.04.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Penunjang	396.300.000,00



NAMA SKPD	KODE KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SIFAT	PAGU
	1.04.03.1.01.0018	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Langsung	231.500.000,00
	1.04.03.1.01.0019	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Langsung	243.000.000,00
	1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Langsung	4.502.783.608,98
	1.04.03.1.02.0012	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Tidak Langsung	66.500.000,00
	1.04.03.1.02.0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Tidak Langsung	1.823.910.000,00
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Penunjang	100.000.000,00
	1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Langsung	50.000.000,00
	1.05.04.1.01.0004	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan	Penunjang	60.000.000,00



NAMA SKPD	KODE KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SIFAT	PAGU
		Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	1.05.03.1.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Penunjang	525.000.000,00
	1.05.03.1.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)	Tidak Langsung	50.000.000,00
	1.05.03.1.02.0022	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Penunjang	100.000.000,00
	1.05.03.1.02.0026	Pengelolaan Risiko Bencana	Tidak Langsung	50.000.000,00
	1.05.03.1.02.0027	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Tidak Langsung	50.000.000,00
	1.05.03.1.02.0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Tidak Langsung	200.000.000,00
	1.05.03.1.02.0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penunjang	200.000.000,00
	1.05.03.1.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Tidak Langsung	75.000.000,00
	1.05.03.1.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Penunjang	25.000.000,00
	1.05.03.1.03.0009	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi	Penunjang	25.000.000,00
	1.05.03.1.03.0025	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Tidak Langsung	50.000.000,00
	1.05.03.1.03.0026	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Provinsi	Tidak Langsung	25.000.000,00
	1.05.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Langsung	250.000.000,00
	1.05.03.1.03.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Penunjang	140.000.000,00



NAMA SKPD	KODE KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SIFAT	PAGU
	1.05.03.1.03.0031	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Penunjang	300.000.000,00
	1.05.03.1.04.0011	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Tidak Langsung	150.000.000,00
	1.05.03.1.04.0013	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	Tidak Langsung	100.000.000,00
	1.05.03.1.04.0016	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Tidak Langsung	25.000.000,00
	1.05.03.1.04.0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Tidak Langsung	100.000.000,00
	1.05.03.1.04.0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Penunjang	75.000.000,00
DINAS SOSIAL	1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Penunjang	400.000.000,00
	1.06.02.1.02.0008	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi	Tidak Langsung	50.000.000,00
	1.06.02.1.02.0013	Koordinasi Pengusulan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi	Tidak Langsung	30.000.000,00
	1.06.03.1.01.0003	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Tidak Langsung	129.843.929,98
	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	Langsung	1.005.000.000,00
	1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang	Langsung	90.000.000,00
	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Langsung	40.000.000,00
	1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Langsung	40.000.000,00



NAMA SKPD	KODE KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SIFAT	PAGU
	1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Langsung	85.802.000,00
	1.06.04.1.01.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Langsung	85.000.000,00
	1.06.04.1.01.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Langsung	25.000.000,00
	1.06.04.1.01.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Langsung	25.000.000,00
	1.06.04.1.01.0017	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Tidak Langsung	1.500.000,00
	1.06.04.1.01.0021	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Penunjang	81.368.000,00
	1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan	Langsung	55.200.000,00
	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	Langsung	94.616.712,00
	1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Langsung	32.373.155,00
	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Langsung	13.809.800,00
	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Langsung	22.154.210,00
	1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Langsung	56.179.520,00
	1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Langsung	8.889.010,01
	1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Langsung	30.000.000,00
	1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Langsung	30.000.000,00
	1.06.04.1.02.0015	Penyediaan Permakanan	Langsung	452.913.905,00
	1.06.04.1.02.0017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Langsung	53.520.000,00
	1.06.04.1.02.0022	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	Langsung	1.500.000,00
	1.06.04.1.02.0023	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Langsung	19.333.000,00



NAMA SKPD	KODE KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SIFAT	PAGU
	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan	Langsung	900.000.000,00
	1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang	Langsung	80.000.000,00
	1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Langsung	50.000.000,00
	1.06.04.1.03.0004	Penyediaan Alat Bantu	Langsung	5.000.000,00
	1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Langsung	25.000.000,00
	1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Langsung	24.000.000,00
	1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Langsung	10.000.000,00
	1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Langsung	15.000.000,00
	1.06.04.1.03.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Langsung	15.000.000,00
	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan	Langsung	74.000.000,00
	1.06.04.1.03.0015	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar	Langsung	2.500.000,00
	1.06.04.1.03.0016	Akses ke Layanan Kesehatan Dasar	Langsung	1.500.000,00
	1.06.04.1.03.0017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penunjang	28.060.000,00
	1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan	Langsung	50.000.000,00
	1.06.04.1.04.0002	Penyediaan Sandang	Langsung	7.000.000,00
	1.06.04.1.04.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Langsung	2.500.000,00
	1.06.04.1.04.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Langsung	5.000.000,00
	1.06.04.1.04.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Langsung	35.000.000,00
	1.06.04.1.04.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Langsung	35.000.500,00
	1.06.04.1.04.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Langsung	4.500.000,00
	1.06.04.1.04.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Langsung	10.000.000,00
	1.06.04.1.04.0010	Pemulangan ke Daerah Asal	Langsung	51.000.000,00



NAMA SKPD	KODE KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SIFAT	PAGU
	1.06.04.1.04.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Penunjang	32.496.400,00
	1.06.04.1.04.0014	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Langsung	20.000.000,00
	1.06.04.1.04.0015	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Langsung	20.000.000,00
	1.06.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan	Langsung	150.000.000,00
	1.06.04.1.05.0002	Penyediaan Sandang	Langsung	18.000.000,00
	1.06.04.1.05.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Langsung	2.500.000,00
	1.06.04.1.05.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Langsung	1.500.000,00
	1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Langsung	70.000.000,00
	1.06.04.1.05.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Langsung	23.000.000,00
	1.06.04.1.05.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Langsung	42.000.000,00
	1.06.04.1.05.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Langsung	8.000.000,00
	1.06.04.1.05.0010	Pemulangan ke Daerah Asal	Langsung	15.000.000,00
	1.06.04.1.05.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Penunjang	50.000.000,00
	1.06.04.1.05.0014	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Langsung	35.000.000,00
	1.06.04.1.05.0019	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Langsung	35.000.000,00
	1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI	Tidak Langsung	50.000.000,00
	1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Langsung	500.000.000,00
	1.06.05.1.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Langsung	127.680.000.000,00



NAMA SKPD	KODE KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SIFAT	PAGU
	1.06.05.1.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Penunjang	60.000.000,00
	1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	Langsung	100.000.000,00
	1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Langsung	150.000.000,00
	1.06.06.1.01.0011	Penyediaan Sandang	Langsung	100.000.000,00
	1.06.06.1.01.0013	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Langsung	100.000.000,00
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.07.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Penunjang	100.000.000,00
	2.07.02.1.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Tidak Langsung	100.000.000,00
	2.07.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Tidak Langsung	80.000.000,00
	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Langsung	1.600.000.000,00
	2.07.03.1.03.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Tidak Langsung	60.000.000,00
	2.07.04.1.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Langsung	50.000.000,00
	2.07.04.1.01.0006	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Langsung	94.000.000,00
	2.07.04.1.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	Langsung	700.000.000,00
	2.07.05.1.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Tidak Langsung	75.000.000,00



NAMA SKPD	KODE KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SIFAT	PAGU
	2.07.05.1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Tidak Langsung	75.000.000,00
	2.07.05.1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Langsung	893.378.880,00
	2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Tidak Langsung	175.000.000,00
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Tidak Langsung	100.000.000,00
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08.02.1.01.0005	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Tidak Langsung	15.000.000,00
	2.08.02.1.01.0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Tidak Langsung	20.000.000,00
	2.08.03.1.01.0003	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Penunjang	21.500.000,00
	2.08.03.1.01.0006	Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	Tidak Langsung	16.500.000,00
	2.08.03.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	Tidak Langsung	22.000.000,00
	2.08.03.1.02.0003	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Langsung	3.600.000,00



NAMA SKPD	KODE KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SIFAT	PAGU
	2.08.03.1.02.0004	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Langsung	14.400.000,00
	2.08.03.1.02.0005	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Langsung	40.000.000,00
	2.08.03.1.02.0007	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Langsung	24.525.000,00
	2.08.03.1.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Langsung	60.000.000,00
	2.08.03.1.02.0009	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Langsung	50.000.000,00
	2.08.03.1.03.0006	penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penunjang	10.098.835,00
	2.08.03.1.03.0008	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	Tidak Langsung	12.500.000,00



NAMA SKPD	KODE KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SIFAT	PAGU
	2.08.04.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Tidak Langsung	11.700.000,00
	2.08.05.1.01.0003	Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Penunjang	9.100.000,00
	2.08.05.1.01.0005	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi	Tidak Langsung	39.750.000,00
	2.08.07.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	Tidak Langsung	120.800.000,00
	2.08.07.1.02.0008	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Langsung	124.525.000,00
	2.08.07.1.02.0010	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Langsung	83.500.000,00
	2.08.07.1.02.0011	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Langsung	25.200.000,00
	2.08.07.1.02.0012	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Langsung	5.940.000,00



NAMA SKPD	KODE KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SIFAT	PAGU
	2.08.07.1.02.0014	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Langsung	60.000.000,00
	2.14.04.1.01.0016	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Tidak Langsung	5.600.000,00
DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.02.1.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Tidak Langsung	15.000.000,00
	2.09.03.1.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Penunjang	15.000.000,00
	2.09.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Penunjang	15.000.000,00
	2.09.03.1.01.0006	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Tidak Langsung	50.000.000,00
	2.09.03.1.01.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Penunjang	100.000.000,00
	2.09.03.1.01.0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Penunjang	25.000.000,00
	2.09.03.1.01.0011	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	Penunjang	1.500.000.000,00
	2.09.03.1.02.0006	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Tidak Langsung	40.000.000,00
	2.09.03.1.02.0007	Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Tidak Langsung	80.000.000,00
	2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Penunjang	57.000.000,00



NAMA SKPD	KODE KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SIFAT	PAGU
	2.09.04.1.02.0003	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Penunjang	70.000.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Penunjang	479.130.299,00
	2.11.05.1.01.0004	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala provinsi	Tidak Langsung	121.416.000,00
	2.11.11.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Penunjang	20.004.623,00
	2.11.11.1.01.0011	Pengelolaan sampah Regional	Tidak Langsung	4.415.000.000,00
	2.11.11.1.01.0012	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	Tidak Langsung	709.453.701,00
	2.11.11.1.01.0015	Pelaksanaan Penanganan Sampah Spesifik atau pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi	Tidak Langsung	585.000.000,00
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	2.12.02.1.01.0002	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Penunjang	1.000.000,00
	2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Penunjang	206.202.400,00
	2.12.02.1.02.0002	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Penunjang	103.727.600,00
	2.12.02.1.02.0003	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Penunjang	1.000.000,00
	2.12.02.1.02.0004	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi	Tidak Langsung	1.000.000,00



NAMA SKPD	KODE KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SIFAT	PAGU
		terkait Pendaftaran Penduduk		
	2.12.02.1.02.0005	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Tidak Langsung	1.000.000,00
	2.12.02.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Tidak Langsung	76.070.000,00
	2.12.03.1.01.0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Tidak Langsung	1.000.000,00
	2.12.04.1.02.0004	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi	Tidak Langsung	195.000.000,00
	2.12.04.1.02.0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Tidak Langsung	87.000.000,00
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04.1.01.0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Penunjang	100.000.000,00
	2.13.04.1.01.0006	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Penunjang	75.000.000,00
	2.13.04.1.01.0012	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Tidak Langsung	10.000.000,00
	2.13.04.1.01.0015	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Penunjang	717.953.168,50
	2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Tidak Langsung	1.000.000.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Tidak Langsung	200.000.000,00
	2.15.02.1.03.0010	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Tidak Langsung	1.000.000.000,00



NAMA SKPD	KODE KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SIFAT	PAGU
	2.15.02.1.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Tidak Langsung	150.000.000,00
	2.15.03.1.10.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tidak Langsung	200.000.000,00
	2.15.03.1.10.0009	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tidak Langsung	312.180.000,00
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	2.16.02.1.01.0015	Penyusunan Konten	Penunjang	700.000.000,00
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.17.02.1.01.0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tidak Langsung	82.836.657,00
	2.17.04.1.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Tidak Langsung	182.416.378,00
	2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Tidak Langsung	1.800.000.000,00
	2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan	Tidak Langsung	1.547.904.046,00



NAMA SKPD	KODE KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SIFAT	PAGU
		Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		
	2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Tidak Langsung	210.756.912,00
	2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Langsung	1.800.000.000,00
	2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Tidak Langsung	167.921.084,00
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18.04.1.02.0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Tidak Langsung	70.001.050,00
	2.18.04.1.02.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Tidak Langsung	196.213.750,00
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Langsung	480.000.000,00
	2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Penunjang	200.000.000,00
DINAS KEBU DAYA DAYA AN	2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Tidak Langsung	420.000.000,00



NAMA SKPD	KODE KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SIFAT	PAGU
	2.22.02.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Penunjang	256.655.000,00
	2.22.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Penunjang	1.400.000.000,00
	2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Tidak Langsung	200.000.000,00
	2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	Penunjang	65.000.000,00
	3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Tidak Langsung	275.000.000,00
	3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Tidak Langsung	725.000.000,00
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Tidak Langsung	57.440.000,00
	2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Tidak Langsung	100.000.000,00
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Tidak Langsung	1.660.000.000,00
	3.25.03.1.01.0010	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Tidak Langsung	940.000.000,00
	3.25.03.1.03.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Penunjang	200.000.000,00
	3.25.04.1.06.0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Langsung	300.000.000,00
	3.25.06.1.03.0004	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku	Tidak Langsung	200.000.000,00



NAMA SKPD	KODE KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SIFAT	PAGU
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	3.27.02.1.02.0007	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Tidak Langsung	200.000.000,00
	3.27.02.1.02.0013	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Tidak Langsung	8.000.000.000,00
	3.27.02.1.02.0014	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	Tidak Langsung	3.250.000.000,00
	3.27.02.1.07.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Tidak Langsung	200.000.000,00
	3.27.02.1.07.0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Tidak Langsung	12.710.000.000,00
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Penunjang	400.000.000,00
DINAS PERKEBUNAN	3.27.02.1.02.0006	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Tidak Langsung	3.438.745.000,00
	3.27.03.1.01.0017	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	Tidak Langsung	1.238.700.000,00
	3.27.07.1.01.0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	Tidak Langsung	8.851.250,00
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Penunjang	37.824.208,00
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Langsung	2.900.000,00
	3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Langsung	29.000.000,00
	3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Langsung	9.269.500,00



NAMA SKPD	KODE KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SIFAT	PAGU
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	3.30.07.1.01.0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Langsung	431.650.000,00
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Penunjang	75.600.000.000,00
	4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Penunjang	500.000.000,00
	4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Penunjang	200.000.000,00
	4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Penunjang	300.000.000,00
	4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Penunjang	500.000.000,00
	4.01.04.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Penunjang	250.000.000,00



NAMA SKPD	KODE KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SIFAT	PAGU
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tidak Langsung	74.078.607.730,00

5.1.8. Kebijakan Belanja untuk Penurunan *Stunting*

Kebijakan belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam upaya percepatan penurunan *stunting* pada Tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat sinergi program lintas perangkat daerah, meningkatkan kualitas pelayanan dasar, serta memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan, hal itu disebabkan bahwa *Stunting* dipandang sebagai isu prioritas daerah karena dampaknya yang luas terhadap kesehatan anak, perkembangan kognitif, produktivitas masa depan, serta daya saing daerah. Pada Tahun 2026 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengalokasikan Rp556.006.387.786,84. Sebagai daerah yang memiliki karakteristik geografis luas, tantangan keterjangkauan layanan kesehatan, serta kondisi sosial-ekonomi yang beragam, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memprioritaskan belanja yang mampu memberikan dampak langsung terhadap perbaikan gizi dan kesehatan masyarakat. Berikut dapat dilihat kebijakan belanja yang disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk percepatan penurunan *stunting* pada Tabel 5.4 Belanja Pemenuhan Penurunan *Stunting*.

Tabel 5.4
Belanja Pemenuhan Penurunan *Stunting*

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	TOTAL RINCIAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	714.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	59.225.002,00



NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	TOTAL RINCIAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	5.01.02.1.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	1.226.000,00
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	5.01.02.1.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	79.750.000,00
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4.900.000,00
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	16.500.000,00
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	48.600.000,00
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	5.006.050,00
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	6.993.950,00
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	13.500.000,00
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan	5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	93.000.000,00



NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	TOTAL RINCIAN
	Pembangunan Daerah			
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	68.500.000,00
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	11.952.905,00
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9.997.095,00
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	49.950.000,00
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	51.600.000,00
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5.000.000,00
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5.000.000,00



NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	TOTAL RINCIAN
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	150.000.000,00
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	17.544.075,00
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	96.675.925,00
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	124.080.000,00
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	88.200.000,00
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10.000.000,00
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5.000.000,00



NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	TOTAL RINCIAN
DINAS ENERGI DAN SUMBER	Peningkatan Pelayanan BLUD	3.29.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.000.000,00
DINAS KEHUTANAN	Peningkatan Pelayanan BLUD	3.28.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.342.380.000,00
	Peningkatan Pelayanan BLUD	3.28.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.157.620.000,00
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	1.383.775,00
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	3.079.000,00
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	2.100.000,00



NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	TOTAL RINCIAN
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	3.600.000,00
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	89.837.225,00
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	1.625.000,00
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	142.836.421,00
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan	3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan	4.543.889,00



NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	TOTAL RINCIAN
	dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		Pemasaran Skala Menengah dan Besar	
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	4.960.000,00
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	1.105.000,00
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	4.125.000,00
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	1.740.890,00
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala	3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	15.550.000,00



NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	TOTAL RINCIAN
	Menengah dan Besar			
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	19.513.800,00
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	4.000.000,00
	Peningkatan Pelayanan BLUD	3.25.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	20.520.992.323,00
	Peningkatan Pelayanan BLUD	3.25.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	642.089.000,00
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Penyelenggaraa n Pendaftaran Kependudukan	2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	206.202.400,00
	Penyelenggaraa n Pendaftaran Kependudukan	2.12.02.1.02.0004	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	571.670,00
	Penyelenggaraa n Pendaftaran Kependudukan	2.12.02.1.02.0004	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	428.330,00
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraa n Pendaftaran Kependudukan	2.12.02.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pendaftaran Penduduk	76.070.000,00



NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	TOTAL RINCIAN
DINAS KESEHATAN	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	391.200,00
	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	6.500.000,00
	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	77.220.000,00
	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	4.200.000,00
	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif	1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1.500.000,00



NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	TOTAL RINCIAN
	Tingkat Daerah Provinsi			
	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	48.750.000,00
	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	24.678.000,00
	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	52.100.000,00
	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	5.880.000,00
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan	450.000,00



NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	TOTAL RINCIAN
	dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	7.100.000,00
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	900.000,00
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	36.326.000,00
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	24.784.000,00
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	2.520.000,00



NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	TOTAL RINCIAN
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	7.920.000,00
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.848.350,00
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	889.650,00
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.100.000,00
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	8.510.000,00
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	7.900.000,00
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	142.480.000,00



P
E
M
E
R
I
N
T
A
H

P
R
O
V
I
N
S
I

K
A
L
I
M
A
N
T
A
N

T
E
N
G
A
H

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	TOTAL RINCIAN
	Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	497.025,00
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.470.000,00
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.400.000,00
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	104.802.000,00
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	163.715.975,00
	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	1.02.03.1.01.0002	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	3.726.625,00



NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	TOTAL RINCIAN
	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	1.02.03.1.01.0002	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	311.375,00
	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	1.02.03.1.01.0002	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.520.000,00
	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	1.02.03.1.01.0002	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	750.000,00
	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	1.02.03.1.01.0002	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	202.762.000,00
	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	1.02.03.1.01.0002	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	42.900.000,00
	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	10.924.520,00
	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.512.000,00



P
E
M
E
R
I
N
T
A
H

P
R
O
V
I
N
S
I

K
A
L
I
M
A
N
T
A
N

T
E
N
G
A
H

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	TOTAL RINCIAN
	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.700.000,00
	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	148.200.000,00
	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	977.420.000,00
	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.600.000,00
	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.049.400.000,00
	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	856.800.000,00
	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	147.082.000,00



NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	TOTAL RINCIAN
	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	3.920.000,00
	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	3.726.000.000,00
	Penyelenggaraa n Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	2.659.565,00
	Penyelenggaraa n Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	59.602.435,00
	Penyelenggaraa n Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	62.738.000,00
	Penyelenggaraa n Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1.260.000,00
	Penyelenggaraa n Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	3.600.000,00
	Penyelenggaraa n Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	35.072.000,00
	Penyelenggaraa n Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	66.230.000,00



NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	TOTAL RINCIAN
	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.285.400.000,00
	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	64.600.000,00
	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	150.000.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	53.440.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	280.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	174.260.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	280.000,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	25.620.000,00



NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	TOTAL RINCIAN
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	34.380.000,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	1.359.045,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	658.155,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	4.544.000,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	28.800.000,00



NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	TOTAL RINCIAN
	Tingkat Daerah Provinsi			
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	519.717.041,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1.557.581.000,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	40.000.000,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1.912.500,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan	1.200.000,00



NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	TOTAL RINCIAN
	untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Minuman di Fasilitas Kesehatan	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	776.000.000,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	160.000.000,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	49.237.500,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.133.203.759,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	15.840.000.000,00



NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	TOTAL RINCIAN
	dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	10.753.782.385,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.277.186.400,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2.896.850,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.550.150,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	3.300.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	9.900.000,00



NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	TOTAL RINCIAN
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	36.120.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	13.924.334.104,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	261.608.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	700.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	63.585.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1.078.684,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	8.892.316,00



P
E
M
E
R
I
N
T
A
H

P
R
O
V
I
N
S
I

K
A
L
I
M
A
N
T
A
N
T
E
N
G
A
H

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	TOTAL RINCIAN
	dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	10.725.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	78.700.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	32.343.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	2.500.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	335.611.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	11.760.000,00



NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	TOTAL RINCIAN
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	93.640.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	48.200.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	450.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	5.000.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	466.120.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	18.760.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	235.255.000,00



NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	TOTAL RINCIAN
	dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	220.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	420.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	13.600.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	35.010.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	192.830.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	7.920.000,00



NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	TOTAL RINCIAN
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	327.590,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	7.437.160,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	5.775.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	28.480.250,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	805.720.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	7.420.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	10.060.000,00



P
E
M
E
R
I
N
T
A
H

P
R
O
V
I
N
S
I

K
A
L
I
M
A
N
T
A
N

T
E
N
G
A
H

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	TOTAL RINCIAN
	dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	357.536.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.800.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	804.900,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.097.100,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	22.330.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5.400.000,00



NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	TOTAL RINCIAN
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	246.195.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	57.960.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3.152.100,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	405.900,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	226.442.000,00
	Penyelenggaraa n Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	70.390.000,00
	Penyelenggaraa n Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	7.660.000,00



K U A T A P R O V I N S I K A L I M A N T A N T E N G A H

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	TOTAL RINCIAN
	Penyelenggaraa n Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	76.100.000,00
	Penyelenggaraa n Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	33.500.000,00
	Penyelenggaraa n Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	115.500.000,00
	Penyelenggaraa n Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	35.000.000,00
	Penyelenggaraa n Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	161.850.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6.429.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10.321.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8.250.000,00



NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	TOTAL RINCIAN
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	13.000.000.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	55.000.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	145.000.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	32.000.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	5.000.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	135.000.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	20.000.000,00



NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	TOTAL RINCIAN
	dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	108.000.000,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	3.480.830.010,45
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	11.519.169.990,00
	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	218.259.293.090,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3.500.000.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	250.000.000,00



NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	TOTAL RINCIAN
	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	4.496.400.000,00
	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	499.600.000,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	6.250.000,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1.529.236.319,99
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1.565.500,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	85.000.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15.000.000,00



NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	TOTAL RINCIAN
	Tingkat Daerah Provinsi			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	76.200.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.000.000.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	423.800.000,00
	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKM Provinsi	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.637.016.661,00
	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKM Provinsi	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	206.640.000,00
	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKM Provinsi	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	10.922.400,00
	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	930.000,00



NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	TOTAL RINCIAN
	Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi			
	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	700.000.000,00
	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.524.416.500,00
	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	19.513.419.664,00
	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.433.840.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2.500.000.000,00
DINAS KETAHANAN PANGAN	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.1.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4.083.300,00
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.1.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3.336.700,00



PEMERINTAH
KUALITA
T
2026
PROVINSI
KALIMANTAN
TENGAH

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	TOTAL RINCIAN
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.1.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	7.580.000,00
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.1.01.0006	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	16.730.000,00
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.1.01.0006	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	12.330.000,00
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.1.01.0006	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	20.940.000,00



NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	TOTAL RINCIAN
	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	2.09.03.1.04.0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	112.349.000,00
	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	2.09.03.1.04.0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	6.600.000,00
	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	2.09.03.1.04.0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	36.051.000,00
	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	2.09.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	38.099.800,00
	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	2.09.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	81.648.000,00



NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	TOTAL RINCIAN
	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	2.09.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	4.372.200,00
	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	2.09.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	50.880.000,00
	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	2.09.03.1.04.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	1.436.200,00
	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	2.09.03.1.04.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	16.483.800,00
	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	2.09.03.1.04.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	3.200.000,00
	Promosi Pencapaian Target Konsumsi	2.09.03.1.04.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola	3.600.000,00



NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	TOTAL RINCIAN
	Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi		Pangan Harapan Provinsi	
	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	2.09.03.1.04.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	10.280.000,00
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	2.09.04.1.02.0003	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	52.715.000,00
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	2.09.04.1.02.0003	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1.755.000,00
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	2.09.04.1.02.0003	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	900.000,00
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	2.09.04.1.02.0003	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	2.000.000,00
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	2.09.04.1.02.0003	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	400.000,00
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	2.09.04.1.02.0003	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	10.280.000,00
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	2.09.04.1.02.0003	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	700.000,00
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	2.09.04.1.02.0003	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1.250.000,00



K U A T A P R O V I N S I K A L I M A N T A N T E N G A H

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	TOTAL RINCIAN
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	91.736.050,00
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	2.495.950,00
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	900.000,00
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	1.600.000,00
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	1.600.000,00
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	30.408.000,00
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	1.260.000,00
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	5.000.000,00
DINAS KOMUNIKASI , INFORMATIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.02.1.01.0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	50.000.000,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kot a	1.03.03.1.01.0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	1.500.000.000, 00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2026

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	TOTAL RINCIAN
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.000.000.000,00
	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.0026	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	3.800.000.000,00
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1.03.05.1.01.0022	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	3.500.000.000,00
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	13.935.000,00
	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan	2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	12.104.275,00



NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	TOTAL RINCIAN
	Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kot a			
	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakata n yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kot a	2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	10.263.763,50
	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakata n yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kot a	2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	25.050.000,00



PEMERINTAH
KALIMANTAN
Tengah
2026

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	TOTAL RINCIAN
	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kot a	2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	30.750.000,00
	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kot a	2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	18.000.000,00
	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat	2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	250.000.000,00



P
E
M
E
R
I
N
T
A
H

P
R
O
V
I
N
S
I

K
A
L
I
M
A
N
T
A
N

T
E
N
G
A
H

K
U
A
T
A

2
0
2
6

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	TOTAL RINCIAN
	Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kot a			
	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakata n yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kot a	2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	14.580.000,00
	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakata n yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kot a	2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	93.821.000,00



NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	TOTAL RINCIAN
	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kot a	2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	123.600.000,00
	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kot a	2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	24.000.000,00
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara n Pemerintahan Desa	2.13.04.1.01.0002	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	2.993.748,00
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara n Pemerintahan Desa	2.13.04.1.01.0002	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	2.824.252,00



K U A T A P R O V I N S I K A L I M A N T A N T E N G A H

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	TOTAL RINCIAN
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraa n Pemerintahan Desa	2.13.04.1.01.0002	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	4.200.000,00
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraa n Pemerintahan Desa	2.13.04.1.01.0002	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	7.950.000,00
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraa n Pemerintahan Desa	2.13.04.1.01.0002	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	8.100.000,00
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraa n Pemerintahan Desa	2.13.04.1.01.0002	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	73.932.000,00
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraa n Pemerintahan Desa	2.13.04.1.01.0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	5.507.625,00
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraa n Pemerintahan Desa	2.13.04.1.01.0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	4.112.375,00
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraa n Pemerintahan Desa	2.13.04.1.01.0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3.000.000,00
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraa n Pemerintahan Desa	2.13.04.1.01.0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	10.550.000,00
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraa n Pemerintahan Desa	2.13.04.1.01.0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	18.400.000,00
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraa n	2.13.04.1.01.0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	58.430.000,00



NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	TOTAL RINCIAN
	Pemerintahan Desa			
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraa n Pemerintahan Desa	2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1.039.500,00
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraa n Pemerintahan Desa	2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2.450.500,00
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraa n Pemerintahan Desa	2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1.800.000,00
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraa n Pemerintahan Desa	2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2.200.000,00
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraa n Pemerintahan Desa	2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	7.500.000,00
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraa n Pemerintahan Desa	2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	50.000.000,00
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraa n Pemerintahan Desa	2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	33.048.000,00
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraa n Pemerintahan Desa	2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	4.500.000,00
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraa n Pemerintahan Desa	2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	224.414.000,00
	Pembinaan dan Pengawasan	2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa	420.000.000,00



NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	TOTAL RINCIAN
	Penyelenggara n Pemerintahan Desa		serta Lomba Desa dan Kelurahan	
	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakata n yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kot a	2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	8.045.847,00
	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakata n yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kot a	2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5.337.972,00
	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakata n yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat	2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga	30.504.600,00



NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	TOTAL RINCIAN
	Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kot a		Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakata n yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kot a	2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	31.500.000,00
	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakata n yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah	2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	62.900.000,00



K U A T A 2 0 2 6 P E M E R I N T A H P R O V I N S I K A L I M A N T A N T E N G A H

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	TOTAL RINCIAN
	Kabupaten/Kot a			
	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakata n yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kot a	2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	19.000.000,00
	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakata n yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kot a	2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	55.600.000,00



PEMERINTAH
KALIMANTAN
Tengah
2026

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	TOTAL RINCIAN
	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kot a	2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	6.350.000,00
	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kot a	2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2.500.000,00
	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat	2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3.000.000,00



P
E
M
E
R
I
N
T
A
H

P
R
O
V
I
N
S
I

K
A
L
I
M
A
N
T
A
N

T
E
N
G
A
H

K
U
A
T
A

2
0
2
6

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	TOTAL RINCIAN
	Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kot a			
	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakata n yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kot a	2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	23.328.000,00
	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakata n yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kot a	2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5.000.000,00



NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	TOTAL RINCIAN
	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kot a	2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1.125.000,00
	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kot a	2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	112.620.000,00
	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat	2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	295.434.000,00



NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	TOTAL RINCIAN
	Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kot a			
	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakata n yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kot a	2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	38.400.000,00
	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakata n yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kot a	2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.000.000.000, 00
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraa	2.13.04.1.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	1.387.158,00



NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	TOTAL RINCIAN
	n Pemerintahan Desa			
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraa n Pemerintahan Desa	2.13.04.1.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	112.842,00
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraa n Pemerintahan Desa	2.13.04.1.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	8.250.000,00
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraa n Pemerintahan Desa	2.13.04.1.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	14.600.000,00
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraa n Pemerintahan Desa	2.13.04.1.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	71.100.000,00
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	2.14.02.1.01.0023	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	1.500.000,00
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	2.14.02.1.01.0023	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	3.600.000,00
	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi,	2.14.03.1.01.0009	Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan	2.000.000,00



NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	TOTAL RINCIAN
	Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal			
	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.14.03.1.01.0009	Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan	3.600.000,00
DINAS PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	115.864.169.000,00
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	200.000.000,00
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	100.000.000,00
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	250.000.000,00
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	300.000.000,00
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	200.000.000,00
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	125.000.000,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
K U A T A 2 0 2 6

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	TOTAL RINCIAN
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRI	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	125.000.000,00
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.737.369,00
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	209.770,00
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2.128.223,00
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	400.000,00
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	300.000.000,00
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	36.425.760,00
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	19.100.000,00
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	139.998.878,00
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	3.269.668,00
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	356.630.332,00
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRI	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	485.675.734,00



NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	TOTAL RINCIAN
	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4.117.731,00
	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	58.620.191,90
	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	201.600.000,00
	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	223.090.000,00
	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	536.400.000,00
	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	15.000.000,00
	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	250.000.000,00
	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	10.000.000,00



NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	TOTAL RINCIAN
	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5.000.000,00
	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	109.000.000,00
	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	250.000.000,00
	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	883.042.000,00
	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	229.350.000,00
	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	548.000.000,00
DINAS PERKEBUNAN	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1.660.875,00
	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1.800.000,00
	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1.084.550.720,00



NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	TOTAL RINCIAN
	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	8.870.400,00
	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	7.803.808,00
	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	9.850.000,00
	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	5.900.000,00
	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	5.400.000,00
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.04.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	6.073.780,00
	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.04.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	3.256.220,00
	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.04.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	8.250.000,00
	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.04.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	10.800.000,00



NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	TOTAL RINCIAN
	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.04.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	148.500.000,00
	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.04.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	219.420.000,00
	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.04.03.1.01.0019	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	5.991.880,00
	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.04.03.1.01.0019	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	25.015.120,00
	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.04.03.1.01.0019	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50.100.000,00
	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.04.03.1.01.0019	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	6.875.000,00
	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10	1.04.03.1.01.0019	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta	12.850.000,00



NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	TOTAL RINCIAN
	(Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	
	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.04.03.1.01.0019	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	142.168.000,00
	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	1.04.05.1.01.0009	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	89.250.000,00
	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	1.04.05.1.01.0009	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	27.380.800.000,00
	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	1.04.05.1.01.0009	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	700.000.000,00
	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	1.04.05.1.01.0009	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	414.780.000,00
	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	1.04.05.1.01.0009	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	24.360.000,00
	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	1.04.05.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	3.837.304,00
	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	1.04.05.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	2.662.696,00
	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	1.04.05.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	193.500.000,00
DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.03.0017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	25.260.000,00



NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	TOTAL RINCIAN
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.03.0017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	2.800.000,00
	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan	22.687.200,00
	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan	27.299.610,00
	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan	13.190,00
	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	1.06.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan	150.000.000,00
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.01.0021	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	57.148.000,00
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.01.0021	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	24.220.000,00
	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	1.06.04.1.04.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	32.496.400,00
	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1.06.04.1.05.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang	42.160.000,00



NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	TOTAL RINCIAN
	Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti		Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	
	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	1.06.04.1.05.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	7.840.000,00
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.02.0022	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	1.500.000,00
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	1.005.000.000,00
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	100.000.000,00
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan	23.673.600,00
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan	800.726.400,00
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan	75.600.000,00
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.0014	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	95.950.125,00
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.0014	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	2.518.814.500,00



NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	TOTAL RINCIAN
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.0014	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	42.375,00
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.0014	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	112.500.000,00
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.0014	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	10.000.000,00
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.0014	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	345.000.000,00
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.0014	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	167.693.000,00
	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	3.600.000,00
	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	32.227.540,00
	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	5.556.943,00
	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	8.568.056,00
	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	3.719.314,00
	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan	387.140.516,00



NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	TOTAL RINCIAN
SEKR ETARI AT DAER			dan Komoditas Pertanian	
	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	500.000,00
	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	2.237.505,00
	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	2.766.512,00
	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	2.292.418,00
	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	50.170.000,00
	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1.221.196,00
	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	400.000.000,00
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.0007	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	3.000.000,00
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.0007	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	196.825.000,00
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.0007	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	175.000,00
	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	48.404.204,00



PEMERINTAH
KALIMANTAN
TENGGAH
2026

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	TOTAL RINCIAN
	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	43.649.396,00
	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	3.000.000,00
	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	971.400,00
	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	28.980.000,00
	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	29.000.000,00
	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	1.000.000,00
	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	10.000.000,00
	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	194.395.000,00
	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	235.434.100,00
	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	63.070.900,00
	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	8.095.000,00
	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	13.720.000,00
	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	102.000.000,00



P
E
M
E
R
I
N
T
A
H

P
R
O
V
I
N
S
I

K
A
L
I
M
A
N
T
A
N

T
E
N
G
A
H

NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	TOTAL RINCIAN
	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	248.680.000,00
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	2.796.160,00
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	23.466.180,00
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	450.000,00
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	17.887.660,00
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	4.400.000,00
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	151.000.000,00
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	300.000.000,00



Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

P
E
M
E
R
I
N
T
A
H

P
R
O
V
I
N
S
I

K
U
A
T
A

2
0
2
2
6

K
A
L
I
M
A
N
T
A
N

T
E
N
G
A
H

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Anggaran pembiayaan diarahkan untuk menutup defisit anggaran apabila terjadi defisit anggaran dan untuk pembentukan dana cadangan serta kewajiban lainnya apabila terjadi surplus anggaran.

Pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 ini jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah diperkirakan sebesar Rp. 266.447.224.660,00.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan terdiri dari :

6.1.1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja dalam APBD tahun anggaran berkenaan yang telah ditutup.
2. Pada Tahun Anggaran 2026 terdapat SiLPA sejumlah Rp266.447.224.660,00
3. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, utang pihak ketiga yang belum terselesaikan, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran.

6.1.2. Pencairan Dana Cadangan

Pada tahun anggaran 2026 ini pencairan dana cadangan tidak dianggarkan.

6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penerimaan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dapat berupa penjualan perusahaan milik daerah/BUMD, penjualan kekayaan milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil investasi penyertaan modal pemerintah daerah. Pada Tahun Anggaran 2026, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak dianggarkan.



6.1.4. Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang dari pihak lain (termasuk obligasi) sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Penerimaan pinjaman daerah yang dianggarkan disesuaikan dengan rencana penarikan pinjaman dalam tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan perjanjian pinjaman. Pada Tahun Anggaran 2026, penerimaan pinjaman daerah tidak dianggarkan.

6.1.5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya. Pada Tahun Anggaran 2026, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah tidak dianggarkan.

6.1.6. Penerimaan Piutang Daerah

Penerimaan piutang daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, yaitu berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank atau penerimaan piutang lainnya. Pada Tahun Anggaran 2026, penerimaan piutang daerah tidak dianggarkan.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :

6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana cadangan yang akan di transfer dari rekening kas umum daerah ke rekening khusus dana cadangan, dalam Tahun Anggaran 2026 dana cadangan tidak dianggarkan.

6.2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1. Penyertaan modal pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana yang akan diinvestasikan/disertakan untuk merealisasikan kerjasama dengan pihak ketiga dan/atau kepada perusahaan daerah atau BUMD.



2. Pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 penyertaan modal Pemerintah Daerah tidak dianggarkan.

6.2.3. Pembayaran Pokok Utang

Pembayaran Pokok Utang digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana guna melunasi pembayaran seluruh kewajiban pokok yang jatuh tempo pada tahun anggaran 2026, termasuk tunggakan atas pinjaman-pinjaman daerah yang dilakukan dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 pembayaran pokok utang tidak dianggarkan.

6.2.4. Pemberian Pinjaman Daerah

Tahun Anggaran 2026, pemberian pinjaman daerah tidak dianggarkan, sebagaimana halnya pada APBD perubahan Tahun Anggaran 2025 juga tidak dianggarkan.



Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

P
E
M
E
R
I
N
T
A
H

P
R
O
V
I
N
S
I

K
A
L
I
M
A
N
T
A
N

T
E
N
G
A
H

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

K
U
A
T
A

2
0
2
2
6



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Kebijakan Umum APBD Tahun 2026 disusun sesuai dengan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah yang akan dicapai pada tahun 2026. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD 2026.

7.1. STRATEGI PENCAPAIAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mencapai target pendapatan daerah dilakukan dengan langkah-langkah kongkrit sebagai berikut :

1. Pembaruan data pajak dan retribusi daerah dalam mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah yang dilaksanakan oleh 24 Perangkat Daerah, 2 RSUD, 1 RSJ, Labkesda, PPOT, SMK dan PBAPL Kumai;
2. Mengembangkan pelayanan pajak daerah dengan melakukan pemutihan pembayaran denda keterlambatan;
3. Pembebasan dan penyederhanaan prosedur pajak dan non pajak;
4. Melakukan pelayanan pada event tertentu di kabupaten/kota seperti pameran pembangunan dan lain-lain;
5. Melakukan evaluasi terhadap potensi dan regulasi penetapan tarif pendapatan dari pajak dan retribusi daerah sesuai yang diamanatkan di dalam Undang-undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah secara intensif;
7. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau PERUSDA;
8. Melakukan Inventarisasi dan pengawasan kendaraan besar, penggunaan bahan bakar minyak, dan penggunaan air permukaan pada perusahaan sektor 3 P (Perkebunan, Pertambangan dan Perhutanan) diseluruh wilayah;



9. Melakukan sosialisasi dan upaya penggalangan partisipasi dari investor dan dunia usaha dalam pembangunan diprovinsi di Kalimantan Tengah melalui sumbangan pihak ketiga /hibah kepada pemerintah daerah.

Tahun 2026 terdapat pengurangan dana transfer ke daerah yang berdampak adanya penurunan pada pendapatan daerah. Pengurangan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat pada tahun anggaran mendatang memerlukan respons kebijakan yang terarah, adaptif, dan berbasis pada penguatan kapasitas fiskal daerah. Dalam rangka menjaga keberlanjutan pembangunan dan stabilitas layanan publik, Pemerintah Daerah menyusun sejumlah strategi kebijakan yang diarahkan untuk mengoptimalkan pendapatan, mengefisiensikan belanja, serta meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Salah satu strategi penting yang ditempuh adalah penguatan kemandirian pembiayaan daerah melalui pendirian dan optimalisasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pendirian BLUD dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi layanan publik sekaligus memperluas ruang fiskal di tengah terbatasnya transfer pusat. Pendirian BLUD diarahkan untuk memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan kepada unit pelayanan tertentu sehingga dapat menjalankan layanan secara lebih profesional, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas. Melalui pola pengelolaan keuangan BLUD, unit pelayanan dapat mengelola pendapatan secara langsung, melakukan inovasi layanan, dan meningkatkan kapasitas pendapatan operasional tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD. Hal ini sejalan dengan kebutuhan daerah untuk mengurangi tekanan anggaran akibat menurunnya Dana Transfer.

Selain itu, Pemerintah Daerah mengoptimalkan pemanfaatan DBH-DR sebagai sumber pembiayaan strategis, terutama untuk mendukung program rehabilitasi hutan, pengelolaan lingkungan, dan pengembangan wilayah yang berbasis keberlanjutan. DBH-DR menjadi instrumen penting dalam memperkuat pendanaan sektor kehutanan, pemulihan lingkungan, serta mendukung program prioritas daerah yang terkait dengan konservasi, mitigasi bencana, dan pembangunan berbasis ekologi. Pemanfaatan DBH-DR secara terencana dan tepat sasaran juga dapat menciptakan multiplier effect terhadap sektor ekonomi lain, terutama sektor pertanian, perkebunan, dan pengelolaan DAS. Optimalisasi DBH-DR dilakukan melalui perencanaan program yang lebih komprehensif, peningkatan kualitas usulan dan dokumen teknis, serta penguatan koordinasi antar-perangkat daerah terkait. Dengan pengelolaan



yang lebih efektif, DBH-DR dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif yang stabil pada saat Dana Transfer mengalami penurunan.

Melalui kombinasi strategi pendirian BLUD dan pemanfaatan DBH-DR, Pemerintah Daerah berupaya menjaga keberlanjutan layanan publik, meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya alam, serta memperkuat struktur fiskal daerah. Kedua strategi ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa pembangunan daerah tetap berjalan optimal meskipun menghadapi keterbatasan dari sisi pembiayaan pusat.

7.2. STRATEGI PENCAPAIAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dan memastikan efektivitas penggunaan anggaran, Pemerintah Daerah menetapkan sejumlah strategi pencapaian kebijakan belanja daerah yang berorientasi pada efisiensi, prioritas, dan peningkatan kualitas layanan publik. Strategi ini disusun untuk menjawab tantangan fiskal, termasuk keterbatasan ruang fiskal dan pengurangan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat, sekaligus menjaga agar target pembangunan daerah tetap dapat dicapai. Dalam pemenuhan target pencapaian belanja daerah tahun 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengupayakan pelaksanaan dengan strategi sebagai berikut :

1. Penajaman prioritas belanja menjadi strategi utama dengan memastikan bahwa alokasi anggaran diarahkan pada program yang memberi dampak langsung kepada masyarakat. Belanja daerah difokuskan pada program wajib, layanan dasar, pembangunan SDM, infrastruktur dasar, serta program yang mendukung percepatan pencapaian indikator kinerja daerah. Pendekatan ini memastikan bahwa belanja benar-benar menyasar kebutuhan paling mendesak dan strategis;
2. Peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja dilakukan melalui pengendalian belanja operasional, rasionalisasi kegiatan yang tidak produktif, serta penerapan prinsip value for money pada seluruh tahapan perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Pemerintah Daerah juga memanfaatkan teknologi informasi untuk memperbaiki tata kelola, mengurangi duplikasi program, dan meningkatkan akurasi perencanaan;
3. Penguatan kelembagaan dan tata kelola keuangan daerah, termasuk optimalisasi penggunaan mekanisme BLUD pada unit-unit layanan untuk meningkatkan fleksibilitas dan kemandirian pembiayaan. Melalui BLUD,



unit layanan dapat mengurangi ketergantungan terhadap APBD sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;

4. Pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif, seperti optimalisasi Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta pemanfaatan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) untuk proyek strategis. Upaya ini dilakukan agar pembangunan tetap berjalan meskipun terjadi keterbatasan belanja yang bersumber dari pendapatan umum daerah;
5. Peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa pelaksanaan belanja sesuai rencana, tepat sasaran, dan berkontribusi terhadap pencapaian target kinerja. Penguatan pengawasan internal juga dilakukan untuk mencegah pemborosan, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat optimal;
6. Penguatan ketahanan pangan melalui *urban farming* untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan;
7. Menerapkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kecerdasan intelektual, mental spiritual dan ketrampilan SDM dalam rangka meningkatkan pelaksanaan program, kegiatan, dan pelayanan kepada masyarakat;
8. Pendanaan bagi program prioritas dan skala besar dengan mengedepankan prinsip *money follow program*.

7.3. STRATEGI PENCAPAIAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan pembiayaan ditujukan untuk keberlangsungan roda pemerintahan dengan harapan tidak mengganggu likuiditas keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan upaya preventif menyikapi pendapatan daerah yang relatif terbatas, sementara kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan pelayanan masyarakat semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

1. Apabila APBD surplus, maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan;



2. Apabila defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja;
3. Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD maka ditutup dengan dana pinjaman;
4. Apabila penerimaan pembiayaan lebih besar daripada pengeluaran pembiayaan maka akan dilakukan optimalisasi belanja dan/atau menjadi SiLPA tahun berjalan.



Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

P
E
M
E
R
I
N
T
A
H

P
R
O
V
I
N
S
I

K
A
L
I
M
A
N
T
A
N

T
E
N
G
A
H

K
U
A
T
A

2
0
2
6

BAB VIII

PENUTUP



BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Provinsi Kalimantan Tengah disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026.

Dokumen KUA Tahun Anggaran 2026 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan, disusun dengan berpedoman pada RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 dan memperhatikan RKP Tahun 2026, serta hasil pembahasan pada forum Musrenbang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025. Dengan demikian, KUA Tahun Anggaran 2026 merupakan komitmen seluruh *stakeholder* yang memuat antara lain Kondisi Makro Daerah, Asumsi Penyusunan APBD, Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, Kebijakan Pembiayaan Daerah, dan Strategi Pencapaian Provinsi Kalimantan Tengah untuk pelaksanaan Tahun 2026. Dokumen KUA disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026.

Berita Acara Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Tengah ini menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026. Apabila terjadi pergeseran/perubahan asumsi yang mendasari penyusunan Kebijakan Umum RAPBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026 akibat adanya perkembangan kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan/atau ketentuan perundang-undangan yang belum ditampung dalam Nota Kesepakatan ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran Provinsi Kalimantan Tengah dapat melakukan penyesuaian/penyelarasan pada saat pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan ini.



Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

penyesuaian/penyelarasan pada saat pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan RAPBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026.

Palangka Raya, 19 Agustus 2025

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



Drs. ARTON, S. DOHONG

Ketua

RISKA AGUSTIN A.Ak., M.M

Wakil Ketua

MUHAMMAD ANSYARI

Wakil Ketua

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



H. AGUSTIAR SABRAN

**WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN TENGAH**

H. EDY PRATOWO, S.Sos., M.M

KA BIRO HUKUM	KA BAPENDA	KA BAPPERIDA	KA BKAD	ASSISTEN	SEKDA

P
E
M
E
R
I
N
T
A
H
P
R
O
V
I
N
S
I
K
A
L
I
M
A
N
T
A
N
T
E
N
G
A
H